



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**PENERAPAN SISTEM KREDIT SEMESTER DI
SMA NEGERI 1 KUDUS**

SKRIPSI

diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Pendidikan

Oleh
MUKHAMMAD ILMAN NAFIA
1102412112
UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**JURUSAN KURIKULUM DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**



2017

PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul “Penerapan Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 1 Kudus” telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke panitia sidang ujian skripsi Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang.

Hari :
Tanggal :

Semarang, 11 Januari 2017

Pembimbing I	Pembimbing II
	
Dr. Yuli Utanto, S.Pd., M.Si. NIP. 19790727 200604 1 002	Dr. Titi Prihatin, M.Pd. NIP. 19630212 199903 2 001

Mengetahui,
Ketua Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan

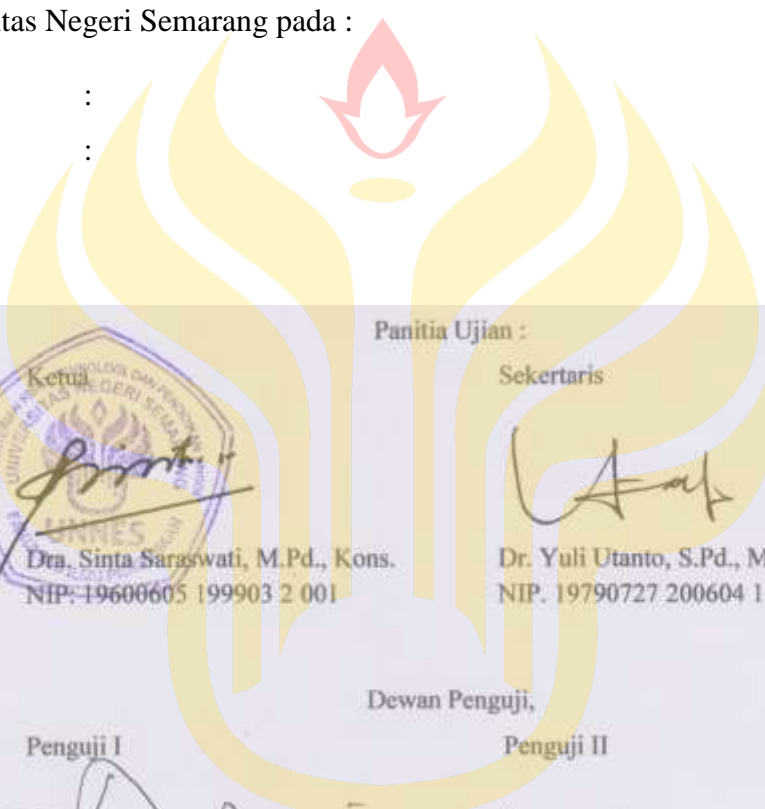

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
UNNES
FIP JUR. KIP
Drs. Sugeng Purwanto, M.Pd.
NIP. 19561026 198601 1 001

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI



Skripsi ini telah dipertahankan di dalam Sidang Panitia Ujian Skripsi,
Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan,
Universitas Negeri Semarang pada :

Hari :



Tanggal :

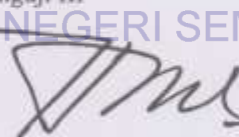


Panitia Ujian :

Ketua  Dra. Sinta Saraswati, M.Pd., Kons. NIP. 19600605 199903 2 001	Sekretaris  Dr. Yuli Utanto, S.Pd., M.Si. NIP. 19790727 200604 1 002
--	---

Dewan Penguji,

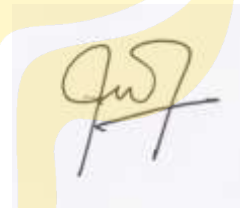
Penguji I  Drs. Wardi, M.Pd. NIP. 19600318 198703 1 002	Penguji II  Dr. Yuli Utanto, S.Pd., M.Si. NIP. 19790727 200604 1 002
--	--

Penguji III

Dr. Titi Prihatin, M.Pd.
NIP. 19630212 199903 2 001

PERNYATAAN UJIAN SKRIPSI

Saya Mukhammad Ilman Nafia menyatakan bahwa yang tertera dalam skripsi berjudul “Penerapan Sistem Kredit Semester Di SMA Negeri 1 Kudus” benar-benar hasil karya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Januari 2017



Mukhammad
Ilman

Nafia
NIM. 1102412112

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

1. “Didiklah anak-anakmu dan baguskanlah pendidikan mereka”. (HR. Ibnu Majah)
2. Pembelajaran adalah cara yang paling ampuh dalam mengoptimalkan potensi anak. (NN)
3. Jika Anda tidak pernah mengeluarkan potensi Anda sesungguhnya, Anda akan tidak bahagia seumur hidup Anda. (Abraham Maslow)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- 1) Almamaterku, Universitas Negeri Semarang sebagai tempat menimba ilmu.
- 2) Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta karunia-Nya kepada penulis sehingga dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Penerapan Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 1 Kudus”, dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, dengan terselesaikannya skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rohman, M.Hum, Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk memperoleh dan menyelesaikan pendidikan di UNNES.
2. Prof. Dr. Fakhrudin, M.Pd., Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan yang telah memberikan ijin untuk melaksanakan penelitian di SMA Negeri 1 Kudus.
3. Drs. Sugeng Purwanto, M.Pd., Ketua Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan.
4. Dr. Yuli Utanto, S.Pd., M.Si., sebagai dosen wali, dosen pembimbing pertama yang telah memberikan bimbingan, dan kritik dengan sabar sehingga peneliti dapat menyelesaikan studi.
5. Dr. Titi Prihatin, M.Pd., sebagai dosen pembimbing kedua yang telah memberikan dukungan dalam bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi.
6. Drs. Wardi, M.Pd., sebagai penguji pertama yang telah menguji skripsi ini dengan penuh kesungguhan dan keikhlasan dalam memberikan masukan , kritik dan saran dalam penulisan skripsi.

7. Bapak dan Ibu Dosen Kurikulum dan Teknologi Pendidikan Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
8. Seluruh warga SMA Negeri 1 Kudus yang telah membantu, membimbing, dan bekerjasama dalam terlaksananya penelitian ini.
9. Orang tua penulis, Bapak Jaenal Dasmin dan Ibu Murtini yang tiada hentihentinya memberikan motivasi, selalu mendidik dengan kasih sayang dan kesabaran serta selalu mendukung penulis baik moral maupun materiil. Serta adik-adikku yang selalu memberikan motivasi dan dorongan untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
10. Sahabat-sahabatku Abdurrafi Dinullah, Acuh Muyayang, Akmal Yuditya, Ari Kurniawan, Arie Lila. U, Arif Fatoni, Deny N. Arfianto, Eka Danu Saputra, Gandhito, Irfan Rahman N, Sholakhudin dan sahabatku lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu, terima kasih atas persahabatan yang kita jalin sampai saat ini.
11. Teman-teman Kurikulum dan Teknologi Pendidikan angkatan 2012 yang selama ini telah memberikan semangat, motivasi, dan dukungan.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penelitian dan penyusunan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan memberikan tambahan wawasan bagi pembaca.

Semarang, Januari 2017
Penulis



Mukhammad Ilman Nafia
NIM 1102412112

ABSTRAK

Nafia, Mukhammad Ilman. 2017. *Penerapan Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 1 Kudus*. Skripsi. Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I Dr. Yuli Utanto, S.Pd., M.Si., Pembimbing II Dr. Titi Prihatin, M.Pd.

Kata Kunci: Penerapan, Sistem Kredit Semester, SMA Negeri 1 Kudus.

Sistem Kredit Semester (SKS) merupakan inovasi pendidikan yang mana peserta didik dapat mengoptimalkan potensi. Hal ini dirasa sesuai karena SKS mengakomodasi karakteristik setiap peserta didik meliputi bakat, minat, dan kemampuannya serta menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi, kendala, dan solusi dalam penerapan SKS. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kudus. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Uji keabsahan data dilakukan dengan triangulasi metode dan sumber. Teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan: (1) SMA negeri 1 Kudus sudah menerapkan SKS sesuai yang dianjurkan oleh Kurikulum 2013 dan PSMA. Implementasi Sistem Kredit Semester (SKS) sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat terlihat dari seluruh komponen yang ada saling mendukung. SMA N 1 Kudus memiliki dua struktur kurikulum dan memodifikasi RPP untuk kelas 4 semester dan 6 semester. Proses pembelajaran menekankan pada teroptimalnya potensi peserta didik dalam mempercepat proses belajar. Sedangkan proses pembelajaran mengacu tiga aspek, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. (2) kendala yang timbul dalam penerapan SKS di SMA N 1 Kudus disebabkan oleh belum terjadi sinkronisasi antara PSMA dan PT (Perguruan Tinggi). Untuk mengatasi kendala tersebut, sekolah telah melakukan koordinasi dengan PSMA dan melakukan pertemuan antar rektor serta membentuk tim PDSS dalam mengakomodasikan keperluan peserta didik. Saran penelitian ditujukan bagi: (1) Kepala Sekolah hendaknya memperhatikan selalu mengikuti perkembangan regulasi pendidikan sebelum menerapkan kebijakan yang baru. (2) Guru hendaknya selalu meningkatkan kompetensi dan mampu menguasai berbagai metode belajar untuk menunjang keberhasilan pembelajaran dengan harapan terwujudnya pembelajaran yang mengakomodasi setiap potensi peserta didik. (3) Waka kurikulum hendaknya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan SKS sehingga kendala yang ditemui dapat diminimalkan agar dapat menekan kemungkinan kendala terjadinya kendala-kendala yang lain.

ABSTRACT

Nafia, Mukhammad Ilman. 2017. *Implementation of Semester Credit System in SMA Negeri 1 Kudus*. Final Project. Curriculum and Education Technology, Faculty of Education, Semarang State University. First Advisor Dr. Yuli Utanto, S.Pd., M.Sc., Second Advisor Dr. Titi Prihatin, M.Pd.

Keywords: Implementation, Semester Credit System, SMA Negeri 1 Kudus.

Semester Credit System (SKS) is an innovative education where learners can optimize their potential. It is considered to be appropriate for Semester Credit System (SKS) to accommodate the characteristics of each learner includes the talents, interests, abilities and complete the educational program in accordance with each of the speed study. The purpose of this study is to describe and analyze the implementation, barriers and solutions in the application of credits. This study was conducted in SMA 1 Kudus. This research is a descriptive qualitative research. Data was collected by observation, interview, and documentation. The validation of the data was done by triangulation of methods and sources. Data analysis techniques included data collection, reduction, data presentation and conclusion. The results showed: (1) SMA Negeri 1 Kudus has already applied appropriate credits which are recommended by Curriculum 2013 and Coaching of High School (PSMA). The implementation of Semester Credit System (SKS) has been running well. It can be seen from all components which support each other. SMA N 1 Kudus has two curriculum structures and modify lesson plans for grades with 4 semesters and 6 semesters. The learning process emphasizes the optimum of potential learners in accelerating the learning process. Meanwhile, the learning process points to three aspects; the attitude, knowledge, and skills. (2) The obstacles that arise in the application of SKS in SMA N 1 Kudus is caused by there is no synchronization between Coaching of High School (PSMA) and Universities yet. To overcome these obstacles, the school had coordinated with the Coaching of High School (PSMA) and held a meeting between the chancellors and also formed School and Student Database (PDSS) team to accommodate learners' necessity. Suggestions of this research are addressed to: (1) Principal should consider the improvement of education regulations before implementing new policies. (2) Teachers should constantly improve their competence and master a variety of learning methods to support the successful of learning which is expected creating learning process that accommodates any learners' potential. (3) The vice principal for curriculum area should conduct monitoring and evaluation of the application of credits so that obstacles can be minimized in order to suppress the possibility of the other obstacles.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Fokus Penelitian.....	8
1.3 Rumusan Masalah.....	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
1.5.1 Manfaat Teoretis.....	8
1.5.2 Manfaat Praktis.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KAJIAN TEORETIK DAN KERANGKA BERFIKIR.....	10
2.1 Kajian Pustaka yang Relevan.....	10
2.2 Pengelolaan Kurikulum melalui SKS.....	11
2.2.1 Definisi Pengelolaan.....	11
2.2.2 Definisi Kurikulum.....	12

2.2.3	Pengelolaan Kurikulum	13
2.2.4	Prinsip dan Fungsi Pengelolaan Kurikulum	14
2.2.5	Perencanaan Kurikulum	15
2.1.5.1	Asas-asas Perencanaan Kurikulum.....	16
2.1.5.2	Sifat Perencanaan Kurikulum.....	17
2.2.6	Implementasi Kurikulum.....	18
2.2.6.1	Prinsip-prinsip Implementasi Kurikulum	19
2.2.6.2	Komponen Implementasi Kurikulum	20
2.2.7	Evaluasi Kurikulum.....	20
2.1.7.1	Prinsip Evaluasi Kurikulum	22
2.1.7.2	Tahap-tahap Evaluasi Kurikulum.....	22
2.2.8	Kurikulum 2013.....	23
2.1.8.1	Definisi Kurikulum 2013.....	23
2.1.8.2	Pengembangan Kurikulum 2013	24
2.1.8.3	Landasan Pengembangan Kurikulum 2013	25
2.1.8.4	Kurikulum 2013 Berbasis Kompetensi.....	27
2.1.8.5	Prinsip Pembelajaran Kurikulum 2013	28
2.1.8.6	Ciri Khas Kurikulum 2013	29
2.2.9	Sistem Kredit Semester dalam Program Pendidikan.....	33
2.2.10	Landasan Hukum Kredit Semester	36
2.2.11	Prinsip Sistem Kredit Semester	37
2.2.12	Struktur Kurikulum dan Beban Belajar SKS.....	38
2.2.13	Perbandingan Pola Kontinu dan Diskontinu SKS	43
2.2.14	Penerapan SKS di Indonesia.....	44
2.2.15	Tahapan <i>Piloting, Diseminasi, Inseminasi</i> , dan Implementasi.....	47

2.3	Kerangka Berfikir	50
BAB III METODE PENELITIAN.....		51
3.1	Jenis Penelitian	51
3.2	Lokasi dan Objek Penelitian.....	51
3.3	Data dan Sumber Data Penelitian.....	52
3.3.1	Data Penelitian.....	52
3.3.2	Sumber Data Penelitian	53
3.3.2.1	Sumber Data Utama (Primer).....	53
3.3.2.2	Sumber Data Pendukung (Sekunder)	53
3.4	Teknik Pengumpulan Data	54
3.4.1	Wawancara	54
3.4.2	Observasi	55
3.4.3	Dokumentasi.....	55
3.5	Alat Pengumpulan Data.....	56
3.6	Uji Keabsahan Data	57
3.7	Teknik Analisis Data	58
3.7.1	Pengumpulan Data.....	58
3.7.2	Data <i>Reduction</i> (Reduksi Data)	59
3.7.3	Data <i>Display</i> (Penyajian Data)	60
3.7.4	Conclusion Drawing/Verification (Kesimpulan).....	60
BAB IV SETTING PENELITIAN		62
4.1	Gambaran Umum Sekolah.....	62
4.1.1	Visi dan Misi SMA N 1 Kudus	64
4.2	Personalia SMA N 1 Kudus	64
4.3	Kurikulum SMA N 1 Kudus.....	65

4.3.1	Kurikulum yang Digunakan	65
4.3.2	Pembelajaran di SMA N 1 Kudus	66
4.3.3	Penilaian di SMA N 1 Kudus	67
BAB V HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN		68
5.1	Implementasi SKS SMA N 1 Kudus	68
5.2	Kendala dan Solusi SKS SMA N 1 Kudus	91
BAB VI PENUTUP		95
6.1	Simpulan	95
6.2	Saran	96
DAFTAR PUSTAKA		97
LAMPIRAN		101

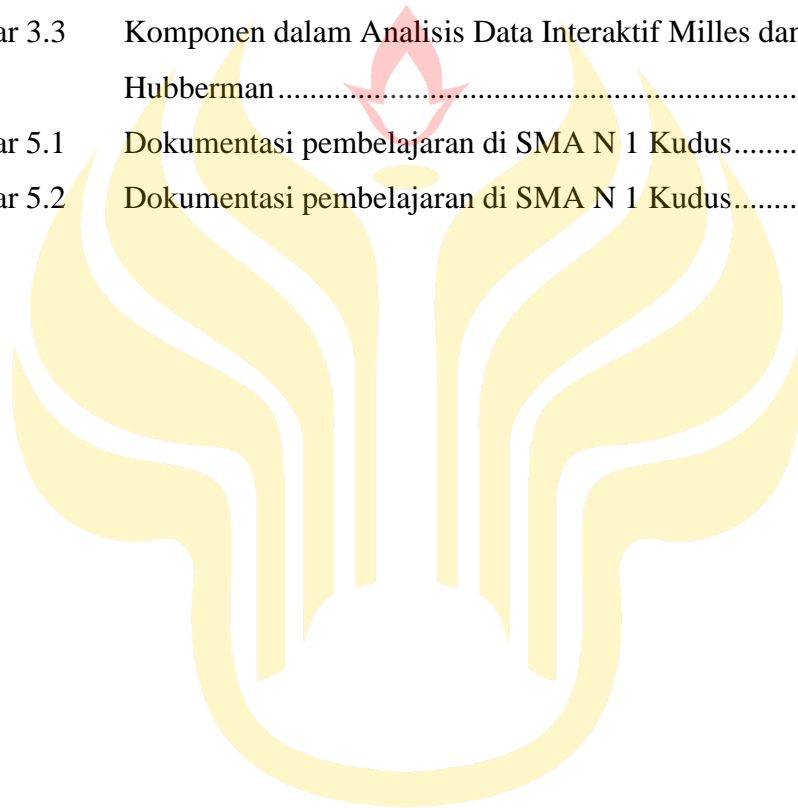


DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1	Penyempurnaan Pola Pikir Kurikulum 25
Tabel 2.2	Prinsip Pembelajaran Kurikulum 2013..... 28
Tabel 2.3	Ciri-Ciri Sistem Kredit Semester 34
Tabel 2.4	Beban Belajar Pendidik dan Peserta Didik 35
Tabel 2.5	Contoh Struktur Kurikulum dan Beban Belajar SKS Pola Kontinu Enam Semester 39
Tabel 2.6	Contoh Struktur Kurikulum dan Beban Belajar SKS Pola Kontinu Empat Semester 40
Tabel 2.7	Contoh Struktur Kurikulum dan Beban Belajar SKS Pola Diskontinu..... 41
Tabel 2.8	Perbandingan Pola Kontinu dan Diskontinu..... 43
Tabel 3.1	Matrik Data dan Sumber Data 56
Tabel 3.2	Kode Instrumen..... 59
Tabel 3.3	Kode Informan..... 59
Tabel 4.1	Jumlah Peserta Didik SMA N 1 Kudus 63

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Sekolah Rujukan	48
Gambar 3.1 Triangulasi dengan Tiga Sumber	57
Gambar 3.2 Triangulasi dengan Tiga Teknik Pengumpulan Data.....	58
Gambar 3.3 Komponen dalam Analisis Data Interaktif Milles dan Hubberman.....	61
Gambar 5.1 Dokumentasi pembelajaran di SMA N 1 Kudus.....	85
Gambar 5.2 Dokumentasi pembelajaran di SMA N 1 Kudus.....	85



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Bagan 2.1 Kerangka Teori.....	50



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1	Kisi-kisi Instrumen.....102
Lampiran 2	Pedoman Observasi.....106
Lampiran 3	Agenda Observasi108
Lampiran 4	Hasil Observasi109
Lampiran 5	Pedoman Wawancara117
Lampiran 6	Daftar dan Kode Informan121
Lampiran 7	Agenda Wawancara122
Lampiran 8	Transkrip Wawancara123
Lampiran 9	Pedoman Dokumentasi.....136
Lampiran 10	Panduan Pelaksanaan SKS.....140
Lampiran 11	Surat Keterangan.....162

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Aspek penting dalam pengembangan pendidikan adalah mutu pendidikan. Pengembangan mutu pendidikan merupakan tanggung jawab semua pihak. Untuk itu, perlu dikembangkan dan dievaluasi demi memperoleh peningkatan mutu pendidikan. Pengembangan pendidikan berkaitan erat dengan mutu pendidikan. Mutu pendidikan dipengaruhi oleh kurikulum. Kurikulum selalu mengalami pengembangan. Pengembangan kurikulum selalu disertai dengan berbagai metode ataupun pendekatan baru, dengan harapan tercipta kurikulum sesuai tujuan nasional.

Keberhasilan pendidikan di lingkungan sekolah terletak pada terlaksananya proses pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan proses interaksi yang melibatkan individu maupun kelompok dalam mencapai tujuannya. Proses pembelajaran adalah komponen dalam kegiatan belajar mengajar. Keberhasilan pembelajaran salah satunya dipegang oleh tenaga pendidik karena fungsi utamanya adalah merancang, mengelola dan mengevaluasi pembelajaran yang ditunjang dengan kreatifitas dan inovasi.

Pola penyelenggaraan pendidikan saat ini menggunakan pola pembelajaran sistem paket (konvensional). Pada pola ini, dalam menyelesaikan program belajar semua peserta didik disamaratakan dan tidak mengakomodasi keragaman kemampuan peserta didik. Program belajar bagi peserta didik yang berbakat tidak

ada kata “*one size fits all*” karena itu akan menghambat perkembangan bagi anak *gifted* (berbakat). Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 “menjamin hak peserta didik dalam mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya serta menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar”. Dari situ perlu adanya pengoptimalan program belajar dari dalam diri peserta didik (*internal*). Dilihat dari penjelasan di atas, perlu adanya suatu inovasi sistem pendidikan yang dapat mencangkup potensi peserta didik. Dengan harapan inovasi tersebut, mampu meningkatkan mutu pendidikan nasional. Salah satu inovasinya melalui mengembangkan kurikulum yang sebelumnya. Kurikulum 2013 dinilai paling pas untuk mengakomodasi kebutuhan peserta didik. Kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan dari kurikulum pendahulunya. Kurikulum 2013 didesain mampu mengembangkan sisi afektif, kognitif dan psikomotorik peserta didik. Departemen Pendidikan Nasional menjelaskan dalam visinya bahwa “kecerdasan mencakup cerdas intelektual, emosional dan spiritual” (Renstra Kemdiknas 2010-2014).

Program pendidikan khusus merupakan program yang mengakomodasi potensi anak *gifted* (berbakat). Program tersebut bertujuan agar potensi yang dimiliki peserta didik teraktualisasi. Jenis program pendidikan khusus tersebut adalah Sistem Kredit Semester. Kemudian Sistem Kredit Semester akan disebut SKS. SKS merupakan program yang menggantikan program akselerasi. Ini tertuang dalam surat edaran pemerintah no: 6398/D/KP/2014 tentang pelaksanaan kelas khusus program akselerasi jenjang pendidikan dasar dan menengah, yang intinya sebagai berikut: 1) Sejak diberlakukannya Kurikulum 2013, secara

otomatis telah mengakomodasikan kebutuhan peserta didik cerdas istimewa dengan menerapkan SKS; 2) Sekolah yang pada tahun pelajaran 2014/2015 masih menyelenggarakan program kelas khusus akselerasi agar diselesaikan sampai tamat dan melakukan penyesuaian perhitungan beban belajar dengan memperhatikan aturan pelaksana Kurikulum 2013, khususnya pada kelas VII SMP dan Kelas X SMA; 3) Mulai tahun pelajaran 2015/2016 dan seterusnya, sekolah tidak diperbolehkan lagi menerima peserta didik baru untuk kelas khusus akselerasi.

Sebagaimana surat edaran ini merupakan menjadi pertimbangan bagi sekolah mantan penyelenggaraan akselerasi untuk menerapkan SKS serta diharapkan bagi sekolah yang akan menyelenggarakan program tersebut mampu mempersiapkan dengan matang. Menurut Dantes (2008) menyatakan bahwa penerapan SKS didasarkan oleh kenyataan bahwa kecepatan belajar seseorang (siswa) adalah tidak sama disebabkan oleh potensial *abiliti* mereka tidak sama sehingga potensi belajar mereka tidak sama juga. Di samping itu, minatnya terhadap mata pelajaran pun tidak sama, sehingga kesuksesan siswa dalam menempuh studi akan sangat besar dipengaruhi oleh hal tersebut.

Menurut Akbar dalam Sarwono (2012: 1423 – 1439) meyakini bahwa

program SKS berbeda dengan akselerasi, pada akselerasi sekolah mewajibkan peserta didiknya untuk mempercepat masa studi dengan kata lain sekolah mempercepat bahan ajar dari yang seharusnya dikuasai oleh siswa saat itu, disini siswa dapat menyelesaikan masa studinya selama dua tahun atau lebih kegiatan belajarnya menjadi satu tahun, akibatnya siswa yang relatif cepat dalam belajar akan mudah, namun siswa yang lamban dalam belajar akan tertinggal. Namun lain halnya dengan SKS, dalam SKS memberikan ruang yang bebas pada peserta didik untuk mengemban masa studinya melalui program percepatan, normal, maupun perlambatan.

Adanya SKS di Kurikulum 2013 merupakan jawaban dari inovasi pendidikan di era modern. SKS memberikan pelayanan kepada peserta didik dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam implementasinya, SKS dianjurkan kepada sekolah SBI, RSBI dan telah terakreditasi A. Selain itu, program khusus SKS dikategorikan program yang masih baru di Kurikulum 2013 terdapat panduan penyelenggaraan yang tertuang dalam BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) dan petunjuk teknis (Juknis). Pada panduan tersebut, khususnya juknis sudah dijelaskan secara jelas penyelenggaraan SKS di sekolah.

Penyelenggaraan SKS tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi mengenai beban belajar bahwa “satuan pendidikan menyelenggarakan program pendidikan menyelenggarakan program pendidikan dengan menggunakan SKS”. Selain itu, penyelenggaraan SKS mengacu pada Permendikbud Nomor 158 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan sistem kredit semester pada pendidikan dasar dan menengah.

Di sisi lain senyatanya bahwa peserta didik memiliki karakteristik yang beragam. Setiap peserta didik memiliki keberagaman dari kebutuhan dan potensinya maupun dari segi bakat, kecepatan, dan minat belajarnya. Setiap peserta didik memiliki cara dan kecepatan yang berbeda dalam belajar. Padahal peserta didik akan lebih berhasil bila selaras dengan potensi dan bakatnya dalam belajar.

Program SKS memberikan pelayanan peserta didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata dan anak *gifted* (berbakat). Menurut Hawadi

(2004:33), mengemukakan bahwa “siswa dengan kecerdasan dan kemampuan luar biasa disebut anak berbakat, dan memang membutuhkan layanan pendidikan khusus”. Anak *gifted* adalah anak yang memiliki kecerdasan di atas rata-rata dan memiliki kelebihan pada kecepatan belajarnya.

Kita ketahui bersama bahwa anak *gifted* memiliki kecepatan dalam belajar. “Jika rata-rata peserta didik pada sekolah menengah dapat menyelesaikan program studinya selama 3 tahun, dengan adanya SKS ini memungkinkan siswa untuk lulus lebih cepat yakni 4 semester atau 2 tahun” (Zaqiyatun & Suharningsih, 2012:1424). Anak *gifted* diberikan kesempatan untuk mengoptimalkan potensinya. Anak *gifted* dapat memaksimalkan potensi dan kecepatan belajar di SKS. Hal yang sama juga dijelaskan dalam jurnal, Zuraida dan Totok (2016) “dengan diselenggarakan kelas program SKS ini juga memungkinkan peserta didik untuk dapat menyelesaikan program pendidikannya lebih cepat dari periode yang ditentukan oleh setiap satuan pendidikan, yaitu program pendidikan dapat diselesaikan dalam waktu tercepat 2 tahun”.

Secara khusus struktur kurikulum SKS di SMA berbeda dengan struktur kurikulum yang diterapkan di sekolah formal biasa. Struktur kurikulum SKS ditujukan untuk mengakomodasi berbagai perbedaan individual peserta didik sehingga siswa dapat diberikan layanan yang optimal oleh sekolah dalam mengembangkan potensi dirinya dalam mempercepat proses studinya” (Alam dan Wiwik, 2016).

SMA N 1 Kudus merupakan sekolah yang telah melaksanakan Kurikulum 2013. Salah satu sekolah unggulan di Kabupaten Kudus sekaligus sebagai sekolah

percontohan untuk sekolah non SKS dalam pelaksanaan Sistem Kredit Semester surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Prov. Jawa Tengah Nomor 426/19148 perihal persetujuan pelaksanaan Sistem Kredit Semester. Dalam pelaksanaan Sistem Kredit Semester, SMA Negeri 1 Kudus tidak sendiri. Berikut daftar sekolah yang melaksanakan Sistem Kredit Semester, antara lain: SMA Negeri 3 Semarang, SMA Negeri 1 Pati, SMA Negeri 1 Salatiga, SMAN 1 Kebumen, SMAN 1 Wonosobo, dan SMA Karangturi Semarang.

SMA N 1 Kudus juga sekolah menengah atas yang telah menyelenggarakan program SKS. Berdasarkan hasil observasi, SMA N 1 Kudus merupakan sekolah favorit di Kabupaten Kudus dan mantan rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) ditunjang dengan sarana prasarana pendukung yang memadai. Selain itu, SMA N 1 Kudus ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Prop. Jateng dan Dinas Pendidikan Kudus sebagai sekolah *piloting* dalam penyelenggaraan program khusus SKS. Berbagai fasilitas pendukung pembelajaran di SMA N 1 Kudus bisa dikatakan memadai dengan adanya fasilitas penunjang pembelajaran dari komputer, laptop, *liquid crystal display* (LCD), CCTV, dan jaringan internet yang sudah terpasang di lingkungan sekolah.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Waka Kurikulum, SMA N 1 Kudus menerapkan dua program yaitu program 4 semester dan 6 semester. Untuk program 4 semester terdapat satu rombongan belajar. Sedangkan yang program 6 semester terdapat sepuluh rombongan belajar. Secara umum tidak terdapat perbedaan yang mencolok, namun dalam hal proses pembelajaran peserta didik program 4 semester lebih cepat menyerap pengetahuan dibandingkan

dengan program 6 semester. Selain itu, bagi guru yang memegang program 4 semester harus lebih mempersiapkan diri dan mengembangkan teknik mengajar karena pembelajaran lebih cepat. Untuk program 4 semester, sebagian materi kelas sebelas sudah diberikan di kelas sepuluh. Hal tersebut juga didukung dengan mengadakan maupun mengikuti berbagai kegiatan berupa diklat, sosialisasi, dan *workshop* yang diikuti oleh tenaga pendidik terkait perencanaan, pembelajaran, dan penilaian dalam program khusus SKS.

Persiapan yang sudah dilakukan SMA N 1 Kudus dalam menyukseskan program khusus SKS, antara lain: koordinator wilayah Karesidenan Pati (Korwil Pati) berinisiatif mengundang pakar SKS dari Pusat kurikulum dan perbukuan (Puskurbuk) Jakarta untuk memberikan penjelasan berdasarkan panduan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP); studi banding Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA N 1 Kudus ke sekolah penyelenggara SKS di SMA Negeri 5 Mataram (NTB) sebagai sekolah pelaksana SKS; studi banding perwakilan guru dan siswa SMA N 1 KUDUS ke SMA 78 di Jakarta; pemantapan dengan *In House Training (IHT)* di SMA 1 Kudus; sosialisasi SKS kepada para siswa baru dan orang tua kelas X.

Dengan latar belakang di atas, sesuai dengan dasar pemikiran, peneliti bermaksud mengangkat judul "Penerapan Sistem Kredit Semester (SKS) Di SMA Negeri 1 Kudus".

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti memfokuskan penelitian pada implementasi SKS pada Kurikulum 2013 di SMA Negeri 1 Kudus Kabupaten Kudus. Konten yang akan dibahas mulai dari implementasi, kendala, dan solusi SKS.

1.3 Rumusan Masalah

- 1) Bagaimanakah implementasi Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 1 Kudus?
- 2) Bagaimana kendala dan solusi Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 1 Kudus?

1.4 Tujuan Penelitian

Bertolak dari permasalahan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, sebagai berikut.

- 1) Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 1 Kudus,
- 2) Mendeskripsikan dan menganalisis kendala dan solusi Sistem Kredit Semester di SMA Negeri 1 Kudus.

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoretis

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan terhadap inovasi pendidikan

terutama bidang Sistem Kredit Semester serta menambah bahan bacaan di perpustakaan jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan pada umumnya dan di perpustakaan pusat Universitas Negeri Semarang pada khususnya.

1.5.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi Kepala Sekolah, pendidik dan Waka kurikulum.

- 1) Bagi Kepala Sekolah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menyediakan informasi dan memberikan pertimbangan dalam penyempurnaan pengembangan dan implementasi kurikulum yang ideal.
- 2) Bagi Pendidik, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai panduan dalam program belajar dan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Sistem Kredit Semester,
- 3) Bagi Waka Kurikulum, hasil penelitian ini mampu memberikan gambaran secara menyeluruh terhadap keadaan program SKS dan diharapkan mampu menjadi tolak ukur serta menjadi pertimbangan ke arah yang lebih baik.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KAJIAN TEORETIK DAN KERANGKA BERFIKIR

2.1 Kajian Pustaka yang Relevan

Adanya kajian pustaka sangat berfungsi bagi peneliti karena membantu dalam memberikan deskripsi tentang penelitian terdahulu sehingga dapat dijadikan tolak ukur dan acuan perbandingan. Dari kajian pustaka, peneliti mencoba mengaitkan penelitian yang dahulu yang relevan dengan topik yang akan diangkat. Melalui penelitian terdahulu diharapkan mampu memberikan persamaan dan perbedaan yang jelas dari penelitian yang akan dikaji.

Penelitian yang relevan milik Ati (2015) membahas tentang implementasi dan dampak dari implementasi SKS terhadap pembelajaran PAI (Pendidikan Agama Islam) dan Budi Pekerti kelas X serta hasil belajar kognitif yang dicapai peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan tahapan proses implementasi SKS, dampak SKS dan hasil belajar peserta didik di SMA Negeri 1 Kebumen. Perbedaan dari penelitian yang dilakukan berada di objek (tempat) penelitian, namun persamaannya secara garis besar sama-sama meneliti Sistem Kredit Semester di SMA.

Penelitian selanjutnya oleh Santoso (2015) yang pembahasannya menekankan pada implementasi pendidikan berbasis SKS dalam meningkatkan kemampuan akademis siswa kelas SCI dan mengetahui faktor penghambat dan pendukung. Hasil dari pembahasan menekankan pada penentu prestasi belajar

didasarkan oleh kemampuan peserta didik dan menyelesaikan program pembelajaran satu semester serta SCI (Siswa Cerdas Istimewa) masuk di kelas khusus. Indikator prestasi belajar meliputi; aspek kognitif, afektif dan psikomotor. Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas sekolah penyelenggaraan pendidikan berbasis SKS namun perbedaan pada peningkatan prestasi akademis, sedangkan pada penelitian ini membahas secara umum penerapan SKS di sekolah.

Penelitian yang relevan selanjutnya dilakukan oleh Jamil (2012) difokuskan pada penyelenggaraan SKS yang masih terdapat kekurangan dan kelebihan dalam pembelajaran serta membahas tentang faktor pendukung dan penghambat penyelenggaraan SKS. Hasil dari penelitian ini diharapkan peserta didik mampu memahami SKS dan peserta didik mendalami mata pelajaran sesuai kebutuhan serta secara umum pembelajaran di PP As Salafiyah sudah menggunakan sistem SKS. Perbedaan dari penelitian ini berada di lokasi penelitian, peneliti lebih memfokuskan pada kurikulum di pondok pesantren namun penelitian ini persamaannya sama-sama meneliti SKS di satuan pendidikan.

2.2 Pengelolaan Kurikulum melalui SKS

2.2.1 Definisi Pengelolaan

Kata pengelolaan berasal dari kata *management*. *Management* berarti manajemen atau pengelolaan. Kedua kata tersebut memiliki persamaan makna. Menurut Manullang (2006:5) “manajemen merupakan sebuah seni dan ilmu perencanaan,

pengorganisasian, penyusunan, pengarahan, dan pengawasan sumber daya untuk mencapai tujuan yang sudah diterapkan”.

Berdasarkan uraian lain menyatakan bahwa “manajemen merupakan suatu proses sosial yang berhubungan dengan keseluruhan usaha manusia dengan manusia lain serta sumber-sumber lainnya dengan menggunakan metode yang efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya” (Hamalik, 2010:16).

Stoner dalam Komariah & Mulyati (2014:86) menyatakan “manajemen merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan”.

Menurut uraian di atas, dapat kita ketahui bahwa pengelolaan merupakan suatu proses manajemen mulai dari perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan dalam mencapai tujuan.

2.2.2 Definisi Kurikulum

Menurut Sudirman dalam Iddi (2013:206) secara etimologi, “kurikulum berasal dari Bahasa Yunani, yaitu *currir* yang berarti berlari dan *curere* yang berarti tempat berpacu”. Dengan demikian, istilah kurikulum berasal dari dunia olahraga pada zaman Romawi Kuno di Yunani, yang mengandung pengertian jarak yang harus ditempuh oleh pelari dari garis *start* sampai *finish*.

Menurut Hamalik (2008: 18) “kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar”.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa “kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”.

Menurut Nasution (2008:5) “kurikulum merupakan suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah atau lembaga pendidikan beserta staf pengajarnya”.

Dari definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana yang digunakan sebagai pedoman untuk mencapai tujuan pendidikan. Secara sempit kurikulum diartikan sebagai kumpulan mata pelajaran yang harus ditempuh siswa. Sedangkan pengertian kurikulum yang lebih luas adalah semua aktivitas yang dilalui siswa yang mampu *mengtransform* membentuk pola pikir untuk mencapai tujuan.

2.2.3 Pengelolaan Kurikulum

Sudarsyah & Nurdin (2014:191), mengungkapkan bahwa “manajemen kurikulum adalah sebagai suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematis dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum”.

Dalam pelaksanaannya, menurut Sudarsyah & Nurdin (2014:191) “terdapat ruang lingkup dalam manajemen kurikulum meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan kurikulum”.

Sedangkan menurut Rusman (2009:3) “manajemen kurikulum adalah sebagai suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematis dalam rangka mewujudkan ketercapaian kurikulum”.

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa pengelolaan atau manajemen kurikulum adalah suatu proses mengelola kurikulum secara sistematis meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan kurikulum yang memprioritaskan ketercapaian tujuan.

2.2.4 Prinsip dan Fungsi Pengelolaan Kurikulum

Menurut Sudarsyah & Nurdin (2014:192), ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam melaksanakan kurikulum, antara lain: (1) produktivitas, berkaitan dengan hasil yang diperoleh sebagai aspek yang dipertimbangkan. (2) demokratisasi, dalam pelaksanaan manajemen, harus berasaskan prinsip demokrasi yang menempatkan pengelola, pelaksana, dan subjek didik sesuai posisi dalam melaksanakan tugas. (3) kooperatif, kerjasama yang positif dari berbagai pihak untuk memperoleh hasil yang diharapkan. (4) efektivitas dan efisiensi, untuk mencapai tujuan kurikulum harus mempertimbangkan hasil dengan biaya, tenaga, dan waktu yang relative singkat.

Sedangkan fungsi dari manajemen kurikulum di antaranya: pertama, kurikulum diketahui beberapa fungsi yang dimiliki manajemen kurikulum; kedua,

meningkatkan keadilan (*equity*) dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal; ketiga, meningkatkan relevansi dan efektifitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar peserta didik; keempat, meningkatkan efektivitas kinerja guru maupun aktivitas siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran; kelima, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses belajar mengajar, Keenam, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan kurikulum.

2.2.5 Perencanaan Kurikulum

Perencanaan adalah bagian dari kurikulum, karena kurikulum merupakan suatu lintasan untuk mencapai tujuan. Menurut Hamalik (2011:213) “perencanaan adalah proses menetapkan tujuan dan menyusun metode, atau dengan kata lain cara mencapai tujuan. Kegiatan perencanaan mengandung sederet kegiatan yang akan dilaksanakan”. Dengan rancangan kurikulum dapat menentukan pelaksanaan pendidikan yang akan diterapkan. Kedudukan rancangan kurikulum sangat penting dalam dunia pendidikan.

Menurut Pratt dalam Ansyar (2015:261) “desain berarti suatu proses perencanaan mencakup objek dan konsep serta upaya untuk mencapai suatu tujuan”.
UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

Menurut Richey et al. (2011:2) “desain merupakan proses sistemik dan reflektif dalam menerjemahkan prinsip belajar mengajar ke dalam suatu rancangan pembelajaran yang mencakup materi instruksional, kegiatan belajar, sumber-sumber belajar, dan sistem evaluasi”.

Sedangkan menurut Beane dalam Hamalik (2011:171) mengemukakan bahwa:

“Curriculum planning is a process in which participants at many levels make decisions about what the purpose of learning ought to be, how those purpose might be carried out through teaching-teaching situations, and whether the purpose and means are both appropriate and effective”.

Penjelasan Beane diatas dapat diartikan bahwa “perencanaan kurikulum adalah suatu proses ketika peserta dalam banyak tingkatan membuat keputusan tentang tujuan belajar, cara mencapai tujuan tersebut melalui situasi mengajar-belajar, serta penelaahan keefektifan dan kebermaknaan metode tersebut”.

Menurut Hamalik (2010:152) perencanaan kurikulum berfungsi (1) sebagai pedoman atau alat manajemen, (2) sebagai penggerak roda organisasi dan tata laksana untuk mencitakan perubahan dalam masyarakat sesuai dengan tujuan organisasi, (3) sebagai motivasi untuk melaksanakan sistem pendidikan sehingga mencapai hasil maksimal.

Berdasarkan pernyataan di atas, “desain merupakan suatu proses perencanaan dan pengembangan kurikulum konsep, berdasarkan teori dan prinsip operasionalnya sebagai pedoman pelaksanaan dalam mencapai tujuan yang diinginkan” (Ansyar 2015:261).

2.1.5.1 Asas-asas Perencanaan Kurikulum

Pada buku manajemen pengembangan kurikulum karangan Hamalik (2010:155-156) menyebutkan terdapat sepuluh asas-asas sebagai berikut:

- (1) objektivitas, perencanaan kurikulum memiliki tujuan yang jelas dan spesifik berdasarkan tujuan pendidikan nasional;
- (2) keterpaduan,

memadukan jenis dan sumber dari berbagai disiplin ilmu, keterpaduan sekolah dan masyarakat, keterpaduan internal, serta keterpaduan dalam menyampaikannya; (3) Manfaat, perencanaan kurikulum menyediakan dan menyajikan pengetahuan dan keterampilan sebagai bahan masukan untuk pengambilan keputusan dan tindakan; (4) efisien dan efektivitas, perencanaan kurikulum disusun berdasarkan prinsip efisien dana, tenaga, dan waktu dan efektif dalam mencapai tujuan dan hasil pendidikan; (5) kesesuaian, perencanaan kurikulum disesuaikan dengan sasaran peserta didik, tenaga kependidikan, IPTEK, dan perubahan/perkembangan masyarakat; (6) keseimbangan, perencanaan kurikulum memperhatikan keseimbangan antara jenis bidang studi, sumber yang tersedia, serta antara kemampuan dan program yang akan dilaksanakan; (7) kemudahan, memberikan kemudahan bagi para pemakainya yang membutuhkan pedoman berupa bahan kajian dan metode untuk melaksanakan proses pembelajaran; (8) berkesinambungan, ditata secara berkesinambungan sejalan dengan tahapan dan jenis dan jenjang satuan pendidikan; (9) pembakuan, perencanaan kurikulum dibakukan sesuai dengan jenjang dan jenis satuan pendidikan, sejak dari pusat, propinsi, kabupaten/ kotamadya; (10) mutu, perencanaan kurikulum memuat perangkat pembelajaran yang bermutu, sehingga turut meningkatkan mutu proses belajar dan kualitas lulusan secara keseluruhan.

2.1.5.2 Sifat Perencanaan Kurikulum

Menurut Hamalik (2010:154-155) perencanaan kurikulum memiliki sifat-sifat sebagai berikut:

- (1) bersifat strategis, karena merupakan instrumen yang sangat penting untuk mencapai tujuan;
- (2) bersifat komprehensif, mencakup keseluruhan aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat;
- (3) bersifat integratif;
- (4) bersifat realistik, berdasarkan kebutuhan nyata peserta didik dan kebutuhan masyarakat;
- (5) bersifat humanistic, menitik beratkan pada pengembangan sumber daya manusia;
- (6) bersifat futuristik, mengacu ke depan dalam merencanakan masyarakat yang maju;
- (7) bagian integral yang mendukung manajemen pendidikan secara sistemik;
- (8) pengembangan kompetensi sesuai dengan standar nasional;
- (9) berdeversifikasi;
- (10) bersifat desentralistik.

2.2.6 Implementasi Kurikulum

“Implementasi merupakan bagian penting dari pengembangan kurikulum, yaitu sebagai proses untuk merealisasi perubahan yang diinginkan” (Ornstein dan Hunkins dalam Ansyar 2015:409).

Menurut Hamalik (2011:238) “implementasi kurikulum merupakan penerapan atau pelaksanaan program kurikulum yang telah dikembangkan dalam tahap sebelumnya, kemudian diuji cobakan dengan pelaksanaan dan pengelolaan”. Pada pelaksanaan kurikulum terdapat tiga kegiatan pokok yaitu pengembangan program, pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi.

Menurut Miller dan Seller sebagaimana dikutip Hamalik (2011:237-238), bahwa “*In some case, implementation has been identified with instruction*”. Lebih lanjut dijelaskan bahwa implementasi kurikulum merupakan suatu penerapan konsep, ide, program, atau tatanan kurikulum ke dalam praktik pembelajaran atau berbagai aktivitas baru, sehingga terjadi perubahan pada sekelompok orang yang diharapkan untuk berubah.

“Implementasi kurikulum adalah proses perubahan untuk memperoleh hasil yang mendekati pencapaian tujuan pendekatan ideal” (Ansyar 2015:408). Berdasarkan Wahyudin (2014) “implementasi kurikulum merupakan sebuah proses penerapan ide, konsep dan kebijakan kurikulum (kurikulum potensial) dalam proses pembelajaran sehingga anak dapat menguasai kompetensi tertentu sebagai hasil interaksi dengan lingkungan”.

Braddy & Kennedy dalam Ansyar (2015:413) implementasi kurikulum melibatkan banyak pihak di sekolah, seperti perubahan pola pikir, perasaan individu, kelompok, dan kultur sekolah.

Agar implementasi kurikulum terlaksana dengan baik, terdapat pedoman pokok:

(1) Perubahan untuk meningkatkan pembelajaran siswa harus benar secara teknis dan ilmiah; (2) Inovasi kurikulum yang sukses mengharuskan perubahan struktur sekolah tradisional; (3) Perubahan harus bisa dikelola dan dilaksanakan sebagian besar guru; (4) Implementasi perubahan yang sukses harus bersifat organik daripada birokratik: melalui pendekatan adaptif dengan mempertimbangkan masalah besar yang dihadapi sekolah dan kondisi sekolah; dan (5) Kurikulum perlu fokus pada upaya, waktu, dan dana yang memadai dengan kegiatan yang jelas, konten yang rasional dan pelaksanaan yang tepat sasaran (Levine dalam Ansyar 2015:410-411).

Dari penjelasan diatas implementasi kurikulum adalah melaksanakan suatu kegiatan sesuai apa yang telah direncanakan dengan tujuan sebagai alat ukur ketercapaian.

2.2.6.1 Prinsip-prinsip Implementasi Kurikulum

Dalam implementasi kurikulum, terdapat beberapa prinsip yang menunjang tercapainya keberhasilan (Hamalik, 2011:239-240). Diantaranya sebagai berikut:

(1) Perolehan kesempatan yang sama, prinsip ini mengutamakan pemberdayaan peserta didik secara demokrasi, berkeadilan, dan berhak menerima pendidikan yang sesuai dengan kemampuan serta kecepatannya. (2) Berpusat pada anak, proses pembelajaran disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan peserta didik melalui pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. (3) Menggunakan pendekatan yang berfokus pada kebutuhan peserta didik dan kemitraan. (4) Kesatuan dalam kebijakan dan keberagaman dalam pelaksanaan.

2.2.6.2 Komponen Implementasi Kurikulum

Implementasi kurikulum berkaitan erat proses pembelajaran. Pada konteks ini, tidak hanya guru yang bertanggung jawab terhadap tercapainya tujuan awal tetapi dukungan semua pihak baik internal maupun *stakeholder*. Menurut Arifin (2011:92) ada beberapa “komponen dalam proses pembelajaran, yaitu guru dituntut untuk menggunakan berbagai strategi pembelajaran, metode mengajar, media pembelajaran, dan sumber-sumber belajar”.

Berdasarkan komponen di atas, diharapkan guru mampu memaksimalkan sehingga potensi yang dimiliki anak dapat terserap secara optimal. Di samping itu, penggunaan komponen tersebut harus disesuaikan dengan tujuan kurikulum, karakteristik mata pelajaran, dan tingkat perkembangan peserta didik.

2.2.7 Evaluasi Kurikulum

Evaluasi merupakan fase yang penting dalam seluruh kegiatan pendidikan. Fase ini memberikan gambaran keberhasilan ataupun kekurangan pada keterlaksanaan suatu kegiatan. Pada fase ini juga dapat dijadikan pertimbangan untuk memperbaiki maupun menyempurnakan pelaksanaan kegiatan.

“Evaluasi merupakan kegiatan yang luas, kompleks dan terus-menerus untuk mengetahui proses dan hasil pelaksanaan sistem pendidikan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan” (Sukmadinata, 2012:173).

Menurut Graves (2001:190) “evaluasi berarti evaluasi mata pelajaran untuk mengakses kompetensi, kemajuan atau prestasi belajar siswa”.

“Sebagian literatur, evaluasi adalah untuk mengukur hasil belajar siswa, mengakses kompetensi dan kemajuan atau prestasi belajar siswa untuk penetapan nilai atau angka” (Ansyar 2015:451).

Tyler dalam Hasan (2009:35) mengungkapkan pengertian evaluasi dalam kutipan sebagai berikut:

“Is the process for determining the degree to which these changes in behavior are actually taking place.”

Penjelasan Tyler diatas dapat diartikan bahwa evaluasi berfokus pada upaya untuk menentukan tingkat perubahan yang terjadi pada hasil belajar (*behavior*). Selain itu, tujuan dari evaluasi adalah untuk menentukan tingkat perubahan yang terjadi.

Menurut Hasan (2009:41) “evaluasi kurikulum sebagai usaha sistematis mengumpulkan informasi mengenai suatu kurikulum untuk digunakan sebagai pertimbangan mengenai nilai dan arti dari kurikulum dalam suatu konteks tertentu”.

Pada uraian lain menyatakan “evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan” (Arikunto dan Abdul Jabar, 2009:2).

Tayibnapi (2008:9) menyatakan “evaluasi suatu program berarti mengumpulkan informasi secara teratur (sistematik) tentang bagaimana program itu berjalan, dampak yang mungkin terjadi atau untuk menjawab pertanyaan yang diminati”.

Arifin (2011:93) “evaluasi kurikulum merupakan usaha yang sulit dan kompleks, karena banyak aspek yang harus dievaluasi, banyak orang yang terlibat, dan luasnya kurikulum yang harus diperhatikan”.

Evaluasi dilakukan berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan dianalisis untuk menimbang kualitas kurikulum yang telah didesain dan efektivitasnya setelah diimplementasikan dalam pembelajaran” (Ansyar 2015:460-461).

Dari penjelasan diatas dapat kita tarik kesimpulan bahwa evaluasi adalah suatu proses yang sistematis dalam memperoleh informasi dan mendapatkan hasil sebagai bahan pertimbangan untuk menyempurnakan kegiatan.

2.1.7.1 Prinsip Evaluasi Kurikulum

Menurut Hasan (2009:159-160) dalam buku tentang evaluasi kurikulum terdapat dua prinsip evaluasi diantaranya:

pertama, prinsip tepat waktu merupakan proses menyelesaikan pekerjaan evaluasi dengan waktu dan jadwal yang telah disepakati. Kedua, prinsip objektivitas adalah sesuatu yang bersesuaian dengan kenyataan empirik. Sesuatu dikatakan objektif karena data atau informasi itu bersesuaian dengan respons terhadap pertanyaan atau kegiatan yang terekam oleh alat tertentu.

2.1.7.2 Tahap-tahap Evaluasi Kurikulum

Pada buku tentang pembinaan dan pengembangan kurikulum di sekolah karangan Sudjana (2005:127) menyatakan bahwa “terdapat dua tahapan yang biasanya digunakan dalam evaluasi kurikulum, yaitu tahap persiapan dan pelaksanaan”.

Pertama, tahap persiapan merupakan tahapan untuk menentukan model penilaian yang akan digunakan. Dalam tahap persiapan ini langkah-

langkah yang harus dilalui, yaitu (1) menyusun *term of reference* penilaian, sebagai rujukan pelaksanaan penilaian, (2) klarifikasi, artinya mengadakan penelaahan perangkat evaluasi, dan (3) uji coba penilaian. Kedua, tahap pelaksanaan, terdiri dari beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan, yaitu (1) pengumpulan data di lapangan, (2) menyusun dan mengolah data hasil penilaian, (3) menyusun deskripsi kurikulum, berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari hasil penilaian, (4) menentukan kesimpulan terhadap deskripsi kurikulum, dan (5) menyusun laporan hasil penilaian.

2.2.8 Kurikulum 2013

2.1.8.1 Definisi Kurikulum 2013

Kurikulum 2013 berpusat pada peserta didik “*student centered*”. Dalam pemecahan sebuah masalah peserta didik dituntut lebih aktif, kreatif dan inovatif. Kompetensi lulusan Kurikulum 2013 peserta didik diharapkan memunyai pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*) dan ketrampilan (*skill*). Dalam pembelajarannya kurikulum 2013 menitik beratkan pada aktif-mencari dan interaktif yang mana peserta didik dapat mencari pengetahuan dari mana saja dan dari siapa saja serta proses belajar mengajar diperkuat dengan pembelajaran saintifik.

Pendekatan saintifik merupakan proses yang dilalui dalam pembelajaran yang dikenal dengan istilah 5M (mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan) sesuai dengan Permendikbud No. 65 Tahun 2013. Pendekatan saintifik membantu guru dalam proses pembelajaran. Ciri pembeda di Kurikulum 2013 berada di empat standart pendidikan yaitu Standar Kompetensi Lulusan (SKL), Standar Proses, Standar Isi, dan Standar Penilaian.

2.1.8.2 Pengembangan Kurikulum 2013

Titik tolak suatu pengembangan berada pada tuntutan dan tantangan zaman terhadap perubahan. Sifat kurikulum yang dinamis membuka lebar adanya penyempurnaan-penyempurnaan. Atas dasar tersebut, pemerintah selalu melakukan pengembangan. Mulai dari rencana pelajaran sampai sekarang kurikulum 2013. Menurut Mulyasa (2013) pengembangan kurikulum karena ditemukan adanya kelemahan dari kurikulum pendahulunya (KTSP), yaitu:

Pertama, Isi dan pesan-pesan kurikulum masih terlalu padat, yang ditunjukkan dengan banyaknya mata pelajaran dan banyak materi yang keluasan dan kesukarannya melampaui tingkat perkembangan usia anak. Kedua, Kurikulum belum mengembangkan kompetensi secara utuh sesuai dengan visi, misi dan tujuan pendidikan nasional. Ketiga, Kompetensi yang dikembangkan lebih didominasi oleh aspek pengetahuan karena aspek tersebut belum sepenuhnya menggambarkan pribadi peserta didik (pengetahuan, keterampilan dan sikap).

Keempat, Berbagai kompetensi yang diperlukan sesuai dengan perkembangan masyarakat, pendidikan karakter, kesadaran lingkungan, pendekatan dan metode pembelajaran konstruktivistik, keseimbangan *soft skill* dan *hard skills*, serta kewirausahaan, belum terakomodasi di dalam kurikulum. Kelima, Kurikulum belum peka dan tanggap terhadap perubahan sosial yang terjadi pada tingkat lokal, nasional dan global. Keenam, Standar proses pembelajaran belum menggambarkan urutan pembelajaran yang rinci sehingga membuka peluang penafsiran yang beraneka ragam dan berujung pada pembelajaran yang berpusat pada guru. Ketujuh, Penilaian belum menggunakan

standar penilaian berbasis kompetensi, serta belum tegas memberi layanan remediasi dan pengayaan secara berkala.

Beberapa kelemahan sebagaimana dikemukakan di atas, penyempurnaan pola pikir kurikulum diperlukan karena untuk menghadapi tantang global yang semakin kompleks dan rumit. Berikut penyempurnaan pola pikir kurikulum: (materi uji publik Kurikulum 2013).

Tabel 2.1 Penyempurnaan Pola Pikir Kurikulum

No	Penyempurnaan Pola Pikir Kurikulum
1	Standar Kompetensi Lulusan diturunkan dari kebutuhan
2	Standar isi diturunkan dari Standar Kompetensi Lulusan melalui Kompetensi Inti yang bebas mata pelajaran.
3	Semua mata pelajaran harus berkontribusi terhadap pembentukan sikap, ketrampilan dan pengetahuan.
4	Mata pelajaran diturunkan dari kompetensi yang ingin dicapai.
5	Semua mata pelajaran diikat oleh kompetensi inti (tiap kelas).

2.1.8.3 Landasan Pengembangan Kurikulum 2013

Pengembangan Kurikulum 2013 dilandasi secara filosofis, yuridis dan konseptual. Berikut penjelasannya menurut Imas Kurniasih & Berlin (2014), pertama Landasan Filosofis; Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran (Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional).

Melalui pendidikan, peserta didik dituntut mengembangkan dan mencerdaskan serta mampu membentuk karakter. Pendidikan berkaitan erat dengan falsafah negara, yaitu: Pancasila. Di lihat dari substansinya, Pancasila merupakan sumber utama sebagai penentu arah yang akan dicapai. Dalam

Mulyasa (2013) “filosofis Pancasila yang memberikan prinsip dasar dalam pembangunan pendidikan dan filosofis pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, kebutuhan peserta didik, dan masyarakat”.

Landasan filosofis pengembangan Kurikulum 2013 berakar pada budaya lokal dan bangsa. Pengembangan Kurikulum 2013 identik dengan pengembangan potensi peserta didik. Dengan demikian pengembangan Kurikulum 2013 merupakan pengembangan potensi peserta didik yang berakar pada budaya lokal dan bangsa.

Kedua, landasan yuridis; Landasan yuridis digunakan untuk merujuk pada pijakan pengembangan kurikulum baru. Landasan yuridis Kurikulum 2013 antara lain Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Permendikbud Nomor 65 tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah, Permendikbud Nomor 71 tahun 2013 tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan Menengah.

Ketiga, landasan konseptual; Dalam Mulyasa (2013:65) Landasan konseptual pengembangan kurikulum 2013 sebagai berikut: aspek relevansi pendidikan (*link and match*), kurikulum berbasis kompetensi dan karakter, pembelajaran kontekstual (*contextual teaching learning*), pembelajaran aktif (*student active learning*) dan penilaian yang valid, utuh dan menyeluruh.

2.1.8.4 Kurikulum 2013 Berbasis Kompetensi

Kurikulum 2013 merupakan pengembangan kurikulum sebelumnya yang berbasis karakter dan kompetensi. Menurut Mulyasa (2014:163-164) secara konseptual kurikulum 2013 memiliki keunggulan, yaitu:

Pertama, Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan yang bersifat alamiah (kontekstual), karena berangkat, berfokus, dan bermuara pada hakekat peserta didik untuk mengembangkan berbagai kompetensi sesuai dengan potensi masing-masing. Kedua, Kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi boleh jadi mendasari pengembangan kemampuan-kemampuan lain.

Pada dasarnya Kurikulum 2013 merupakan tindak lanjut dari kurikulum berbasis kompetensi (KBK). Kurikulum berbasis kompetensi memfokuskan pengembangan pada pengetahuan, keterampilan dan sikap peserta didik. Menurut Burke dalam Mulyasa (2013: 66) mengemukakan bahwa kompetensi:

“... is knowledge, skills and abilities or capabilities that a person achieves, which become part of his or her being to the extent he or she can satisfactorily perform particular cognitive, affective and psychomotor behaviours”.

Dalam hal ini, kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang serta mampu melakukan perilaku kognitif, afektif dan psikomotor sebaik-baiknya. Kompetensi diarahkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik sesuai dengan dunia kerja. Dengan begitu peserta didik memperoleh kompetensi sesuai tujuan yang telah ditentukan.

Kurikulum 2013 berbasis kompetensi memfokuskan pada pemerolehan kompetensi-kompetensi oleh peserta didik. Menurut Mulyasa (2013:68-69) terdapat dua landasan teoritis yang mendasari Kurikulum 2013 berbasis kompetensi.

Pertama, Adanya pergeseran pembelajaran kelompok kearah pembelajaran individu. Dalam pembelajaran individual peserta didik dapat belajar sesuai dengan cara dan kemampuan masing-masing. Kedua, pengembangan konsep belajar tuntas (*mastery learning*) adalah sistem pembelajaran yang tepat dan peserta didik mampu mempelajari semua bahan yang diberikan dengan hasil yang baik.

Dengan demikian, atas keterkaitan dalam konsepnya Kurikulum 2013 yang dicita-citakan mampu melahirkan manusia generasi masa depan yang memiliki kecerdasan yang komprehensif baik intelgensi, emosi, sosial dan spiritualnya.

2.1.8.5 Prinsip Pembelajaran Kurikulum 2013

Proses pembelajaran Kurikulum 2013 menekankan pada pendekatan saintifik. Dalam proses pembelajaran terjadi perubahan dengan kurikulum sebelumnya. Berikut penjelesannya dalam tabel (Permendikbud No. 65 Tahun 2013):

Tabel 2.2 Prinsip Pembelajaran Kurikulum 2013

No	Kurikulum Sebelumnya	Kurikulum 2013
1	Peserta didik diberi tahu	Peserta didik mencari tahu
2	Guru sebagai satu-satunya sumber belajar	belajar berbasis aneka sumber belajar
3	Pendekatan tektual	pendekatan proses sebagai penguatan penggunaan pendekatan ilmiah
4	Pembelajaran berbasis konten	pembelajaran berbasis kompetensi
5	Pembelajaran parsial	pembelajaran terpadu
6	Pembelajaran yang menekankan pada jawaban tunggal	pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multi dimensi
7	Pembelajaran verbalisme	keterampilan aplikatif
8		Peningkatan dan keseimbangan antara <i>hard skills</i> dan <i>soft skills</i>

10	Pembelajaran memberi nilai keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik
11	Pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat
12	Pembelajaran menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa
13	Pemanfaatan teknologi informasi dan efektivitas pembelajaran
14	Pengakuan atas perbedaan individual dan latar belakang budaya peserta didik.

Dengan demikian, dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembelajaran Kurikulum 2013 peserta didik lebih aktif, inovatif, kreatif, dan produktif yang diperkuat dengan pendekatan ilmiah (saintifik). Dalam proses pembelajaran juga mengharapkan keseimbangan antara pengetahuan, sikap dan ketrampilan.

2.1.8.6 Ciri Khas Kurikulum 2013

Pelaksanaan Kurikulum 2013 memiliki ciri khas pada dua aspek yaitu aspek proses pembelajaran dan aspek penilaian. Proses pembelajaran di Kurikulum 2013 menggunakan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik meliputi komponen pembelajaran, antara lain: mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Sedangkan aspek penilaian memakai penilaian autentik. Penilaian autentik meliputi penilaian sikap, pengetahuan, dan ketrampilan.

2.1.8.6.1 Pembelajaran Saintifik

Pembelajaran saintifik merupakan hal baru dalam proses pembelajaran. Menurut Permendibud No. 65 tahun 2013 yang diperbarui Permendibud No. 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar dan menengah, bahwa standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan.

Implementasi Kurikulum 2013, standar proses menggunakan pendekatan saintifik sebagai komponen pembelajaran. Menurut Imas K & Berlin S dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2013) terdapat komponen pembelajaran antara lain: mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan mengkomunikasikan. Penjelasannya sebagai berikut: pertama, mengamati merupakan metode mengamati memberikan kesempatan sangat luas kepada peserta didik dalam pembelajaran. Peserta didik dapat mengamati pembelajaran dengan melihat, membaca, mendengar, dan menyimak. Metode mengamati sangat bermanfaat untuk melatih ketelitian dan meningkatkan rasa ingin tau peserta didik. Dengan metode mengamati peserta didik menemukan fakta bahwa ada hubungan antara obyek dengan materi pembelajaran.

Kedua, menanya dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 guru harus mampu meningkatkan dan mengembangkan kemampuan peserta didik. Metode menanya salah satu bentuk untuk meningkatkan kemampuan verbal peserta didik. Peserta didik dapat mengajukan pertanyaan dari melihat, membaca, mendengar, dan menyimak. Ketiga, menalar, Imas K & Berlin S (2014: 147) mengatakan bahwa penalaran adalah proses berfikir yang logis dan sistematis atas fakta-fakta empiris

yang dapat diobservasi untuk memperoleh simpulan berupa pengetahuan. Istilah menalar adalah *associating*. Dalam konteks pembelajaran asosiasi adalah proses mengelompokkan beragam ide dan mengasosiasikan beragam peristiwa untuk kemudian memasukkannya menjadi penggalan memori.

Keempat, mencoba, dalam Fandi (2015: 46) menyatakan bahwa kegiatan mencoba bermanfaat untuk meningkatkan keingintahuan siswa, mengembangkan kreativitas, dan keterampilan kerja ilmiah. Kegiatan ini mencakup merencanakan, merancang, dan melaksanakan *eksperimen*, serta memperoleh, menyajikan, dan mengolah data. Pemanfaatan sumber belajar termasuk mesin komputasi dan otomasi sangat disarankan dalam kegiatan ini.

Kelima, mengkomunikasikan, berdasarkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (2013: 141) menyebutkan bahwa kegiatan mengomunikasikan adalah sarana untuk menyampaikan hasil konseptual dalam bentuk lisan, tulisan, gambar/sketsa, diagram, atau grafik. Kegiatan ini dilakukan agar siswa mampu mengomunikasikan pengetahuan, keterampilan, dan penerapannya, serta kreasi siswa melalui presentasi, membuat laporan, dan atau unjuk karya.

2.1.8.6.2 Penilaian Autentik

Pada Kurikulum 2013 memungkinkan para guru menilai hasil belajar peserta didik dalam proses pencapaian sasaran belajar, yang mencerminkan penguasaan dan pemahaman terhadap apa yang dipelajari (Mulyasa, 2013:68).

Sistem penilaian Kurikulum 2013 berbeda dengan kurikulum sebelumnya. Penilaian Kurikulum 2013 (autentik) mencakup tiga aspek, yaitu: sikap,

pengetahuan, dan keterampilan. Menurut Imas & Berlin (2014:48), “penilaian autentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan (*input*), proses dan keluaran (*output*) pembelajaran yang meliputi ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan”.

Penilaian autentik sangat sesuai dengan pembelajaran saintifik. Penilaian autentik disebut juga penilaian responsif merupakan suatu cara menilai proses dan hasil belajar. Penilaian autentik berorientasi pada proses dan hasil pembelajaran. Hasil penilaian autentik dapat untuk merencanakan program pengayaan maupun perbaikan juga sebagai bahan untuk evaluasi proses pembelajaran sesuai standar penilaian.

Untuk mencapai tujuan penilaian, perlu kiranya memperhatikan teknik maupun cara menilai dalam penilaian autentik. Menilai aspek pengetahuan, dapat dilakukan dengan ujian tulis dan ujian lisan. Menilai aspek keterampilan dapat dilakukan dengan ujian praktek, penilaian proyek dan penilaian portofolio. Sedangkan menilai aspek sikap, dilakukan dengan observasi, penilaian diri dan penilaian antar teman. Di bawah ini akan diuraikan penjelasan tentang teknik menilai dalam penilaian autentik.

Menilai aspek pengetahuan meliputi: 1) ujian tulis merupakan tes yang soal dan jawabannya tertulis berupa pilihan ganda, isian, dan uraian. Selain itu, pada tes ini menuntut peserta didik untuk mengingat dan memahami materi yang telah diperoleh dengan menguraikan dalam bentuk tulisan. 2) ujian lisan berupa pertanyaan yang diberikan oleh guru kepada peserta didik dengan cara tanya

jawab secara langsung. Tujuan dari ujian ini adalah untuk mengukur pemahaman materi dan melatih berpikir cepat dengan merespon pertanyaan.

Menurut Imas K & Berlin S (2014: 63-64) menilai aspek keterampilan meliputi:

1) ujian praktek adalah suatu bentuk penilaian untuk mencapai kompetensi. Peserta didik diminta untuk melakukan aktivitas pembelajaran untuk mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan. Contohnya memainkan alat musik. 2) ujian proyek adalah penilaian terhadap tugas yang harus diselesaikan dalam jangka waktu tertentu. Penilaian ini juga mengandung investigasi dan mampu mengembangkan ketrampilan berfikir tinggi (berpikir kritis, *problem solving*, berpikir kreatif). misalnya membuat laporan pemanfaatan *energy* di dalam kehidupan. 3) penilaian portofolio memberikan gambaran menyeluruh tentang proses dan pencapaian hasil belajar. Penilaian portofolio dilakukan melalui kumpulan tugas peserta didik yang tersusun secara sistematis dan terorganisir selama kurun waktu tertentu.

Menurut Imas K & Berlin S (2014: 61) menilai aspek sikap meliputi:

1) observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara sistematis dengan menggunakan indera, baik langsung maupun tidak langsung. Format observasi berupa indikator perilaku yang diamati. 2) penilaian diri merupakan penilaian yang meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya terkait ketercapaian kompetensi. 3) penilaian antar teman merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan sikap dan perilaku.

2.2.9 Sistem Kredit Semester dalam Program Pendidikan

Sistem Kredit Semester (SKS) merupakan inovasi program pendidikan. Acuan perumusan konsep SKS tertuang dalam Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi bahwa SKS adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang siswanya menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan. Sedangkan menurut Nyoman

Dantes sistem semester adalah sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan waktu terkecil.

Menurut Munif Chatib penerapan SKS, peserta didik dapat mengambil banyak mata pelajaran maka peserta didik tersebut mampu lulus dengan cepat. Selain itu, SKS memiliki beberapa ciri-ciri meliputi ketuntasan kurikulum, bobot bidang studi, kelulusan siswa, penerapan, dan konsekuensi. Berikut pemikiran Munif Chatib tentang sebagai berikut:

Tabel 2.3 Ciri-Ciri Sistem Kredit Semester

Ciri- Ciri	Sistem Kredit Semester
Ketuntasan Kurikulum	Disyaratkan dengan sejumlah SKS yang harus diselesaikan peserta didik, contoh 110-120 SKS.
Bobot bidang studi	Setiap bidang studi mempunyai bobot tertentu.
Kelulusan siswa	Jika peserta didik mampu menyelesaikan jumlah SKS minimal, dia dapat dinyatakan lulus.
Penerapan	Biasanya dilakukan di perguruan tinggi.
Konsekuensi	Waktu kelulusan peserta didik berbeda-beda, bergantung kemampuannya dengan mengambil bidang studi dengan SKS sesuai kemampuan.

Penyelenggaraan pendidikan dalam satu semester terdiri atas kegiatan teori, praktikum dan kerja lapangan, baik dalam bentuk tatap muka, belajar terstruktur dan kerja mandiri. Dalam satu semester ditawarkan sejumlah mata pelajaran dengan bobot sks yang bervariasi, sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam kurikulum (Nyoman Dantes, 2008).

Program penyelenggaraan pendidikan lebih khususnya pada pelaksanaan sistem kredit semester menekankan pendekatan pembelajaran tatap muka, kegiatan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. Selanjutnya dari ketiga kegiatan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

pertama, kegiatan tatap muka merupakan kegiatan pembelajaran yang berupa proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Kedua, kegiatan terstruktur merupakan kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi. Waktu penyelesaian penugasan terstruktur ditentukan oleh pendidik. Ketiga kegiatan mandiri tidak terstruktur merupakan kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi. Waktu penyelesaiannya diatur sendiri oleh peserta didik, (BSNP, 2010:7).

Dari ketiga kegiatan pembelajaran tersebut, peserta didik dibebankan satu jam pelajaran. Beban belajar satu jam pelajaran terdiri atas 45 menit kegiatan tatap muka dan minimal 60% untuk kegiatan penguasaan terstruktur dan tugas mandiri tidak terstruktur. Sedangkan durasi satu jam pelajaran dapat dilaksanakan 30 menit bagi peserta didik yang memiliki kecerdasan diatas rata-rata. Menurut Nyoman (2008) sistem pelaksanaan SKS merangkum beban peserta didik, beban pendidik dan beban lembaga penyelenggara yang dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks). Hal ini dipertegas mengenai beban dan tugas pendidik dan peserta didik menurut Saputra (2014), sebagai berikut:

Tabel 2.4 Beban Belajar Pendidik dan Peserta Didik

Beban 1 SKS	Kegiatan Tatap Muka	Kegiatan Tugas Terstruktur	Kegiatan Mandiri Tidak Terstruktur
Bagi Guru	Instruksional 45menit terjadwal	Pembimbingan 45 menit terjadwal	Perancangan tugas, evaluasi dan kegiatan pembinaan sebagai penasihat akademik
Bagi Peserta Didik	Wajib mengikuti kegiatan instruksional terjadwal	Wajib melaksanakan praktik/inquiry/diskusi/pr esentasi hasil kerja terjadwal	Melaksanakan tugas-tugas pengayaaan seara mandiri

2.2.10 Landasan Hukum Kredit Semester

Dalam penyusunan kurikulum SMA Negeri 1 Kudus menggunakan acuan landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Wewenang antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2007 tentang tentang Standar Isi mengenai beban belajar bahwa “satuan pendidikan menyelenggarakan program pendidikan menyelenggarakan program pendidikan dengan menggunakan SKS.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi.

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses.
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian.
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMA/MA.
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Buku teks pelajaran dan buku panduan guru untuk pendidikan dasar dan menengah.
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 A Tahun 2013 tentang Implementasi Kurikulum
16. Surat Edaran Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 156928/MPK.A/KR/2013, tanggal 8 November 2013, perihal Implementasi Kurikulum 2013.
17. Surat Edaran bersama Menteri Dagri No 420/176/SJ dan Mendikbud Nomor 0258/MPK.A/KR/2014 tgl 9 jan 2014 perihal Implementasi kur 2013.
18. Permendikbud Nomor 158 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan sistem kredit semester pada pendidikan dasar dan menengah.

2.2.11 Prinsip Sistem Kredit Semester

Dalam ruang lingkup penyelenggaraan Sistem Kredit Semester di SMP/MTs dan SMA/MA yang berpedoman pada prinsip pelaksanaan, terdapat sembilan prinsip utama dalam SKS, yakni: (1) Peserta didik menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti pada setiap semester sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; (2) Peserta didik yang berkemampuan dan berkemauan

tinggi dapat mempersingkat waktu penyelesaian studinya dari periode belajar yang ditentukan dengan tetap memperhatikan ketuntasan belajar; (3) Peserta didik didorong untuk memberdayakan dirinya sendiri dalam belajar secara mandiri; (4) Peserta didik dapat menentukan dan mengatur strategi belajar dengan lebih fleksibel; (5) Peserta didik memiliki kesempatan untuk memilih program studi dan mata pelajaran sesuai dengan potensinya; (6) Peserta didik dapat pindah (*transfer*) kredit ke sekolah lain yang sejenis yang menggunakan SKS dan semua kredit yang telah diambil dapat dipindahkan ke sekolah yang baru; (7) Sekolah menyediakan sumber daya pendidikan yang lebih memadai secara teknis dan administratif; (8) Penjadwalan kegiatan pembelajaran diupayakan dapat memenuhi kebutuhan untuk pengembangan potensi peserta didik yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan; (9) Guru memfasilitasi kebutuhan akademik peserta didik sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, (BSNP, 2010: 6).

2.2.12 Struktur Kurikulum dan Beban Belajar SKS

Mengacu pada Permendikbud No. 59 tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah terdiri dari tiga kelompok mata pelajaran, yaitu: kelompok A (umum) dan B (umum) dan kelompok C peminatan. Beban belajar untuk tingkat SMA berjumlah 260 jam pelajaran yang dapat ditempuh secara bervariasi. Dengan begitu sekolah penyelenggara SKS dapat menyusun struktur kurikulum dan beban belajar tiap semester secara bervariasi. Dua pola pembelajaran yang dapat dilakukan, yaitu pola kontinu dan pola

diskontinu (on/off), (Dalam Direktorat Pembinaan SMA tentang model pengembangan SKS, 2015: 12).

Pertama, pola pembelajaran kontinu setiap mata pelajaran selalu muncul di tiap semester. Dalam hal ini pemilihan beban belajar berlaku ketika peserta didik memilih tambahan jam pelajaran (beban belajar) pada beberapa atau semua mata pelajaran sesuai dengan kemampuan dan pilihannya. Struktur kurikulum dapat disusun beragam, terdiri atas: 6 semester, 5 semester, dan/atau 4 semester. Berikut contoh struktur kurikulum dan beban belajar pola kontinu (Dalam Direktorat Pembinaan SMA tentang model pengembangan SKS, 2015: 12).

Tabel 2.5 Contoh Struktur Kurikulum dan Beban Belajar SKS Pola Kontinu Enam Semester

NO	MATA PELAJARAN	SEMESTER/BEBAN (JP)						JML
		1	2	3	4	5	6	
KELOMPOK A (UMUM)								
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	3	3	3	3	3	3	18
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	2	2	2	2	2	12
3	Bahasa Indonesia	4	4	4	4	4	4	24
4	Matematika	4	4	4	4	4	4	24
5	Sejarah Indonesia	2	2	2	2	2	2	12
6	Bahasa Inggris	2	2	2	2	2	2	12
KELOMPOK B (UMUM)								
7	Seni Budaya	2	2	2	2	2	2	12
8	Pendidikan Jasmani Olahraga dan	3	3	3	3	3	3	18

	Kesehatan							
9	Prakarya dan Kewirausahaan	2	2	2	2	2	2	12
KELOMPOK C PEMINATAN								
10	MP 1	3	3	4	4	4	4	22
11	MP 2	3	3	4	4	4	4	22
12	MP 3	3	3	4	4	4	4	22
13	MP 4	3	3	4	4	4	4	22
14	MP 5	3	3	4	4	4	4	22
15	MP 6	3	3					6
JUMLAH BEBAN PELAJARAN (JP)		42	42	44	44	44	44	260

Keterangan

- (1) MP 1, MP 2, MP 3, dan/atau MP 4 adalah mata pelajaran peminatan utama yang terdiri atas kelompok MIPA, IPS, dan Ilmu Bahasa
- (2) MP 5, MP 6, dan/atau MP 4 adalah mata pelajaran lintas minat di luar peminatan utama

Tabel 2.6 Contoh Struktur Kurikulum dan Beban Belajar SKS Pola Kontinu Empat Semester

NO	MATA PELAJARAN	SEMESTER/BEBAN (JP)				JML
		1	2	3	4	
KELOMPOK A (UMUM)						
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	4	4	5	5	18
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	3	3	3	3	12
3	Bahasa Indonesia	6	6	6	6	24
4	Matematika	6	6	6	6	24
5	Sejarah Indonesia	3	3	3	3	12
6	Bahasa Inggris	3	3	3	3	12

KELOMPOK B (UMUM)

7	Seni Budaya	3	3	3	3	12
8	Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	4	4	5	5	18
9	Prakarya dan Kewirausahaan	3	3	3	3	12

KELOMPOK C PEMINATAN

10	MP 1	5	5	6	6	22
11	MP 2	5	5	6	6	22
12	MP 3	5	5	6	6	22
13	MP 4	5	5	6	6	22
14	MP 5	5	5	6	6	22
15	MP 6	3	3			6
JUMLAH BEBAN PELAJARAN (JP)		63	63	67	67	260

Keterangan

- (1) MP 1, MP 2, MP 3, dan/atau MP 4 adalah mata pelajaran peminatan utama yang terdiri atas kelompok MIPA, IPS, dan Ilmu Bahasa
- (2) MP 5, MP 6, dan/atau MP 4 adalah mata pelajaran lintas minat di luar peminatan utama

Kedua, pola pembelajaran diskontinu, mata pelajaran disusun dalam bentuk serial. Untuk mengakomodasi peserta didik yang cepat, maka jumlah serial maksimum adalah 4 (empat) seri. Dengan serial mata pelajaran ini, satuan pendidikan menyusun peta pembelajaran (*road map*) untuk enam, lima, dan empat semester secara bervariasi. Berikut contoh struktur kurikulum dan beban belajar model empat seri (Dalam Direktorat Pembinaan SMA tentang model pengembangan SKS, 2015: 15).

Tabel 2.7 Contoh Struktur Kurikulum dan Beban Belajar SKS Pola Diskontinu

NO	MATA PELAJARAN	SEMESTER/BEBAN (JP)				JML
		1	2	3	4	
KELOMPOK A (UMUM)						
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	6	6	6		18
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	4	4	4		12
3	Bahasa Indonesia	6	6	6	6	24

4	Matematika	6	6	6	6	24
5	Sejarah Indonesia	4	4	4		12
6	Bahasa Inggris	4	4	4		12
KELOMPOK B (UMUM)						
7	Seni Budaya	4	4	4		12
8	Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan	4	4	5	5	18
9	Prakarya dan Kewirausahaan	4	4	4		12
KELOMPOK C PEMINATAN						
10	MP 1	6	6	6	4	22
11	MP 2	6	6	6	4	22
12	MP 3	6	6	6	4	22
13	MP 4	6	6	6	4	22
14	MP 5	6	6	6	4	22
15	MP 6	6				6
JUMLAH BEBAN PELAJARAN (JP)						260

Keterangan

- (1) MP 1, MP 2, MP 3, dan/atau MP 4 adalah mata pelajaran peminatan utama yang terdiri atas kelompok MIPA, IPS, dan Ilmu Bahasa
- (2) MP 5, MP 6, dan/atau MP 4 adalah mata pelajaran lintas minat di luar peminatan utama

Selanjutnya struktur kurikulum dengan serial mata pelajaran menjadi acuan untuk merancang peta pembelajaran (*road map*) yang disediakan sebagai pilihan oleh peserta didik sesuai dengan kecepatan belajar dan strategi belajarnya. Peserta didik dapat memilih masa studi 4, 5, atau 6 semester sesuai dengan kecepatan belajarnya. Di sisi lain untuk masa studi 5 atau 6 semester diberikan variasi *road map* yang disusun untuk mengakomodasi distribusi lebih merata terkait beban mengajar guru 24 jam pelajaran tatap muka (Direktorat PSMA tentang model pengembangan SKS, 2015: 16).

2.2.13 Perbandingan Pola Kontinu dan Diskontinu SKS

Pada pelaksanaan SKS terdapat dua pola, yaitu pola kontinu dan pola diskontinu. Pola kontinu setiap mata pelajaran selalu muncul tiap semester, sedangkan pola diskontinu mata pelajaran tidak harus dimunculkan tiap semester. Pada pola kontinu, sekolah dapat menyusun variasi pembelajaran sesuai dengan kecepatan belajarnya. Struktur kurikulum terdiri atas: 4 semester, 5 semester, dan 6 semester. Pada pola diskontinu, sekolah menyusun serial mata pelajaran dengan jumlah maksimal 4 seri. Penyusunan serial mata pelajaran tidak mengubah urutan materi dan kompetensi (KI dan KD) yang tertuang pada standar isi. Sekolah dapat menyusun peta jalan (*roadmap*) sebagai pilihan yang disediakan bagi peserta didik sesuai dengan strategi yang dipilih.

Dalam pelaksanaannya pola kontinu dan diskontinu terdapat perbedaan, meliputi: penjadwalan mata pelajaran, struktur mata pelajaran, pengaturan beban mengajar guru, pengambilan beban tambahan, pengalihan dari rombongan belajar lebih cepat ke lebih lambat, pengalihan dari rombongan belajar lebih lambat ke lebih cepat, pelaksanaan tugas PA, penyusunan perangkat pembelajaran, penerapan sesuai jumlah rombongan belajar. Berikut ini perbandingan pola kontinu dan diskontinu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.8 Perbandingan Pola Kontinu dan Diskontinu

Aspek	Pola Kontinu	Pola Diskontinu
Penjadwalan mata pelajaran	Muncul di tiap semester	Beberapa mata pelajaran tidak muncul tiap semester
Struktur mata pelajaran	<ul style="list-style-type: none"> Tidak sama sesuai kecepatan belajarnya. Satuan pendidikan menyediakan struktur kurikulum dan beban belajar mata pelajaran bervariasi Program aplikasi 	<ul style="list-style-type: none"> Disusun maksimal 4 seri berlaku sama untuk semua variasi kecepatan belajar Program aplikasi dapat disusun dengan kode matapelajaran yang sama

	menggunakan pengkodean mata pelajaran berbeda untuk kecepatan belajar yang berbeda	
Pengaturan beban mengajar guru minimal 24 jam pelajaran	Lebih mudah	Lebih sulit, karena harus diatur roadmapp bervariasi
Pengambilan beban tambahan sesuai dengan indeks Prestasi	Kurang fleksibel, peserta didik terkondisi dengan pemilihan beban belajar yang seragam	Lebih fleksibel, peserta didik terkondisi pengisian KRS yang beragam
Pengalihan dari rombongan belajar lebih cepat ke lebih lambat	Lebih sulit, karenanya tugas PA dan BK menjaga prestasi dan kecepatan belajar peserta didik tetap stabil	Lebih mudah, karena masih ada pilihan bervariasi yang tersedia
Pengalihan dari rombongan belajar lebih lambat ke lebih cepat	Lebih Sulit, karena seri mata pelajaran berbeda di kelas lebih cepat materi cenderung lebih banyak. Solusinya adalah dengan program matrikulasi pada jeda waktu sebelum semester berikutnya dimulai.	Lebih mudah, karena seri mata pelajarannya sama
Pelaksanaan tugas PA	Lebih mudah, peserta didik cenderung ada pada kelas yang tetap	Lebih dinamis, peserta didik boleh jadi tidak selalu dalam kelas yang tetap
Penyusunan perangkat pembelajaran (silabus, RPP, bahan ajar)	Disusun dalam unit-unit tertentu sesuai dengan materi pokok. Kemudian dikemas untuk tiap semester menurut variasi kecepatan belajar	Disusun dalam unit-unit tertentu sesuai dengan materi pokok. Kemudian dikemas menurut seri yang dapat digunakan untuk semua variasi kecepatan belajar
Penerapan sesuai jumlah rombongan belajar	Disarankan untuk sekolah kecil (jumlah paralel rombongan belajar sampai dengan 6)	Disarankan untuk sekolah besar (jumlah paralel rombongan belajar 8 ke atas)

Sumber: (Direktorat PSMA tentang model pengembangan SKS, 2015: 7-8)

2.2.14 Penerapan SKS di Indonesia

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai tahun pelajaran 2013/2014 telah menetapkan implementasi Kurikulum 2013 secara terbatas. Berdasarkan data PSMA yang telah menerakan di 1.270 SMA sasaran dan sejumlah SMA yang melaksanakan secara mandiri. Sekolah yang menerapkan merupakan sekolah yang

sudah memenuhi Standar Nasional Pendidikan (SNP). Di samping itu, sekolah tersebut sudah terakreditasi A yang memiliki praktik yang baik.

Penerapan Sistem Kredit Semester diberlakukan sejak Kurikulum 2013 dioperasionalkan. Kemudian Sistem Kredit Semester akan disebut SKS. SKS merupakan bentuk penyempurnaan dari program akselerasi. Tertuang dalam surat edaran pemerintah no: 6398/D/KP/2014 tentang pelaksanaan kelas khusus program akselerasi jenjang pendidikan dasar dan menengah, yang intinya sebagai berikut: Sejak diberlakukannya Kurikulum 2013, secara otomatis telah mengakomodasikan kebutuhan peserta didik cerdas istimewa dengan menerapkan SKS.

Menurut Akbar dalam Sarwono (2012: 1423 – 1439) meyakini bahwa program SKS berbeda dengan akselerasi, pada akselerasi sekolah mewajibkan peserta didiknya untuk mempercepat masa studi dengan kata lain sekolah mempercepat bahan ajar dari yang seharusnya dikuasai oleh siswa saat itu, disini siswa dapat menyelesaikan masa studinya selama dua tahun atau lebih kegiatan belajarnya menjadi satu tahun, akibatnya siswa yang relatif cepat dalam belajar akan mudah, namun siswa yang lamban dalam belajar akan tertinggal. Namun lain halnya dengan SKS, dalam SKS memberikan ruang yang bebas pada peserta didik untuk mengemban masa studinya melalui program percepatan, normal, maupun perlambatan.

Pengaturan tentang sistem SKS mengacu pada Permendiknas No. 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi. Di mana dalam peraturan disebutkan bahwa beban belajar dengan sistem satuan kredit semester adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81A Tahun 2013 Tentang Implementasi Kurikulum 2013 mengenai pedoman umum pembelajaran disebutkan bahwa konsep SKS adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan. Kemudian diperbarui mengacu pada Permendikbud Nomor 158 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan sistem kredit semester pada pendidikan dasar dan menengah.

Penyelenggaraan SKS sementara ditujukan untuk sekolah rujukan ataupun piloting. Penyelenggaraan SKS akan dilakukan secara bertahap, mulai dari kelas X (sepuluh) hingga semua kelas menerapkannya. Pada proses penyelenggaraan SKS dilakukan evaluasi dan perbaikan guna kedepannya siap dilaksanakan pada sekolah imbas.

Dalam menyukseskan SKS, sekolah melakukan kemitraan dengan beberapa instansi antara lain: 1) Pusat kurikulum dan perbukuan; 2) Direktorat PSMA; 3) Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten.

Penyelenggaraan SKS di SMA merupakan salah satu upaya inovatif dan kreatif dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui layanan yang bervariasi untuk mengakomodasi kemajemukan peserta didik dalam hal minat, kebutuhan, potensi, bakat, dan kecepatan belajarnya. Menurut Dantes (2008) menyatakan bahwa penerapan SKS didasarkan oleh kenyataan bahwa kecepatan belajar seseorang (siswa) adalah tidak sama disebabkan oleh potensial abiliti mereka tidak sama sehingga potensi belajar mereka tidak sama juga. Berbeda dengan

sistem paket dengan pola layanan yang seragam, penyelenggara SKS perlu menyiapkan terkait keragaman dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi program pendidikan di sekolahnya.

Penyelenggaraan SKS dalam pengelolaan pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah di Indonesia merupakan suatu alternatif untuk menambah kekayaan pengelolaan pembelajaran. Selama ini sistem pengelolaan pendidikan hanya menggunakan satu cara, yaitu Sistem Paket. Melalui penerapan SKS dimungkinkan peserta didik dapat menyelesaikan program pendidikan lebih cepat sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.

Dalam jurnalnya, Zuraida dan Totok (2016) “dengan diselenggarakan kelas program SKS ini juga memungkinkan peserta didik untuk dapat menyelesaikan program pendidikannya lebih cepat dari periode yang ditentukan oleh setiap satuan pendidikan, yaitu program pendidikan dapat diselesaikan dalam waktu tercepat 2 tahun”. Struktur kurikulum SKS ditujukan untuk mengakomodasi berbagai perbedaan individual peserta didik sehingga siswa dapat diberikan layanan yang optimal oleh sekolah dalam mengembangkan potensi dirinya dalam mempercepat proses studinya” (Alam dan Wiwik, 2016).

2.2.15 Tahapan *Piloting*, *Diseminasi*, *Inseminasi*, dan Implementasi

Adapun tahapan dalam implementasi Sistem Kredit Semester, sebagai berikut:

Tahap *piloting* merupakan tahap dimana suatu konsep diuji cobakan supaya penerapannya dapat dijadikan contoh sekolah lain. Tahap *piloting* usaha terbaik untuk meningkatkan mutu baik bidang akademik maupun non akademik.

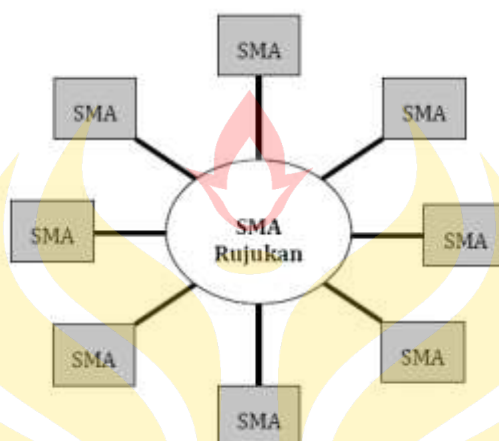
Bagi sekolah *piloting* memiliki akreditasi A dan memiliki inovasi pendidikan dengan praktik yang baik. Bagi sekolah *piloting* bersedia memberikan pengimbasan praktik yang baik dalam hal inovasi pendidikan.

Berdasarkan PSMA, dengan memperhatikan azas desentralisasi dalam pengelolaan pendidikan, pelaksanaan tahapan ini dirancang dengan melibatkan pemerintah daerah yang secara teknis dan manajerial dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dalam bentuk kemitraan.

Pada tahap ini memerlukan persyaratan dasar, yaitu: *akseptabilitas*, *akuntabilitas*, *reflikabilitas*, dan *sustainabilitas*. *Akseptabilitas* artinya seluruh warga sekolah menerima, terutama kepala sekolah dan tenaga pendidik selaku penanggungjawab dan pelaksana. *Akuntabilitas* artinya bahwa konsep yang akan diterapkan dapat dipertanggungjawabkan. *Reflikabilitas* artinya pengelolaan konsep dapat ditirukan di sekolah lain. *Sustainabilitas* artinya konsep tersebut dapat dijaga kesinambungannya setelah dilakukan uji coba.

Tahap *diseminasi* merupakan tahapan memasyarakatkan konsep yang telah diujicobakan. Pengelolaan sekolah *piloting* *didiseminasikan* ke sekolah lain yang berlokasi di sekitarnya. Dalam proses pengimbasan, sekolah *piloting* akan menjadi model bagi sekolah imbasnya dalam bentuk proses *replikasi*. Dalam *mereplikasi* sekolah *piloting*, Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dibantu oleh sumber daya manusia dari sekolah *piloting* mengadopsi strategi yang diterapkan dengan memanfaatkan pengalaman yang diperoleh. Pengimbasan pengelolaan sekolah yang *didiseminasikan* ke sekolah

lain dengan moda gugus/sekolah kluster (*cluster schools*) seperti diilustrasikan dalam di bawah ini:



Gambar 2.1 Sekolah Kluster

Tahap *inseminasi* merupakan tahap untuk mengembangkan ilmu dan model. Berdasarkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui Dinas Pendidikan dapat mengembangkan berbagai program pembangunan pendidikan sebagai implementasi kebijakan pemerintah daerah yang mengacu pada kekhasan karakteristik dan tantangan lokal. Dalam konteks ini, Dinas Pendidikan Provinsi dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dapat memberdayakan sekolah *piloting* sebagai sasaran awalnya sekaligus sebagai hub atau titik simpul *diseminasi*.

Tahap implementasi merupakan tahap untuk mengembangkan berbagai kegiatan yang telah disepakati bersama. Terdapat tiga tahapan dalam pelaksanaan antara lain penataan, pemantapan, dan kemandirian.

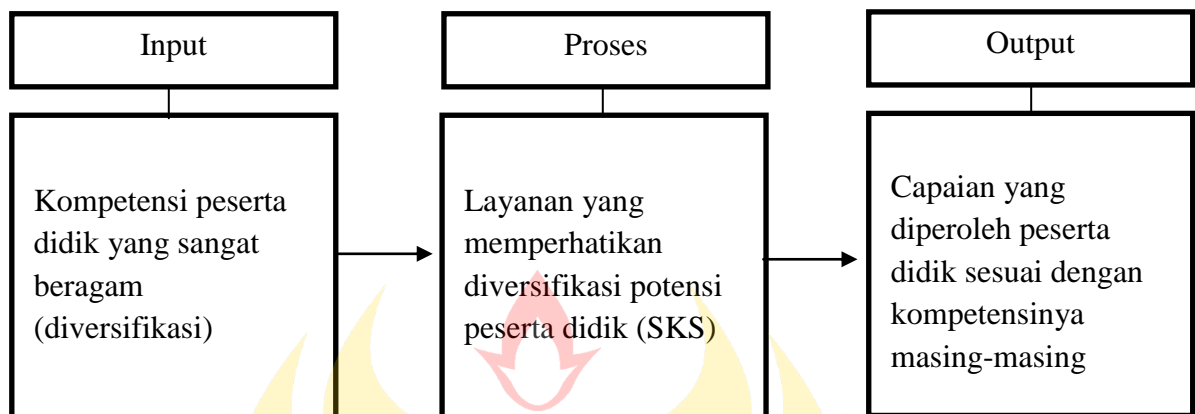
2.3 Kerangka Berfikir

Sistem Kredit Semester (SKS) merupakan sebuah upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah. SKS bertujuan mengakomodasi keragaman potensi peserta didik. Pada pola pembelajarannya SKS memberikan kebebasan dalam mengambil beban belajar dan memilih mata pelajaran sesuai dengan kemampuan.

SMA Negeri 1 Kudus merupakan sekolah pelaksana SKS. SMA Negeri 1 Kudus merupakan sekolah percontohan (*piloting*) yang mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Prov. Jateng dan Dinas Dikpora Kabupaten Kudus.

Berdasarkan penelitian awal, pelaksanaan SKS di Kurikulum 2013 merupakan salah satu pendekatan baru. Pelaksanaan SKS di SMA Negeri 1 Kudus merupakan program inovasi dengan tujuan peserta didik dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan. Dalam penerapan SKS mencakup tiga hal yaitu: input, proses, dan output.

Kerangka berfikir ini bertujuan supaya penelitian dapat sesuai dengan alur pemikiran dan berkesinambungan sehingga analisa dilakukan secara terstruktur dan sistematis sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini bersifat dinamis karena kerangka berfikir tetap terbuka dan dapat menyesuaikan kondisi di lapangan. Berikut kerangka berfikir dalam penelitian ini:



Bagan 2.1 Kerangka Berfikir Penerapan SKS Di SMA N 1 Kudus



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

BAB VI

PENUTUP

6.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian di SMA N 1 Kudus mengenai Penerapan SKS di SMA N 1 Kudus, dapat disimpulkan bahwa:

1. SMA negeri 1 Kudus sudah menerapkan SKS sesuai yang dianjurkan oleh Kurikulum 2013 dan PSMA. Implementasi Sistem Kredit Semester (SKS) sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat terlihat dari seluruh komponen yang ada saling mendukung. SMA N 1 Kudus memiliki dua struktur kurikulum dan memodifikasi RPP untuk kelas 4 semester dan 6 semester. Proses pembelajaran menekankan pada teroptimalnya potensi peserta didik dalam mempercepat proses belajar. Sedangkan proses pembelajaran mengacu tiga aspek, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
2. Kendala yang timbul dalam penerapan SKS di SMA N 1 Kudus disebabkan oleh belum terjadi sinkronisasi antara PSMA dan PT (Perguruan Tinggi). Untuk mengatasi kendala tersebut, sekolah telah melakukan koordinasi dengan PSMA dan melakukan pertemuan antar rektor serta membentuk tim PDSS dalam mengakomodasikan keperluan peserta didik.

6.2 Saran

Berdasarkan simpulan penelitian di atas maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Kepala Sekolah hendaknya selalu mengikuti perkembangan regulasi pendidikan sebelum menerapkan kebijakan yang baru.
2. Pendidik hendaknya selalu meningkatkan kompetensi dan mampu menguasai berbagai metode belajar untuk menunjang keberhasilan pembelajaran dengan harapan terwujudnya pembelajaran yang mengakomodasi setiap potensi peserta didik.
3. Waka kurikulum hendaknya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan SKS sehingga kendala yang ditemui dapat diminimalkan agar dapat menekan kemungkinan kendala terjadinya kendala-kendala yang lain. .

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Pudji W., dan Wiwik Sri Utami. 2016. Implementasi Sistem Kredit Semester (SKS) Ditinjau Dari Ketercapaian Standar Nasional Pendidikan Pada Jenjang SMA Di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Swara Bhumi*, Volume 01 Nomer 02 Tahun 2016. Diakses melalui <http://ejournal.unesa.ac.id> pada tanggal 30 Agustus 2016.
- Ansyar, M. 2015. *Kurikulum (Hakikat, Fondasi, Desain dan Pengembangan)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Arifin Z. 2011. *Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Arikunto, Suharsimi dan Cepi Safruddin Abdul Jabar. 2009. *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoritis Praktis Bagi Praktisi Pendidikan (Edisi 2)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ati, Lutfi M. 2015. Implementasi Sistem Kredit Semester dan Dampaknya Terhadap Pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti Kelas X Di SMA Negeri 1 Kebumen. *Skripsi*. Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga. Diunduh di <http://digilib.uin-suka.ac.id/>. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2016.
- BSNP. 2010. *Panduan Penyelenggaraan Sistem Kredit Semester*. Jakarta: Badan Standar Nasional Pendidikan.
- Chatib, Munif. 2012. *Orangtuanya Manusia: Melejitkan Potensi dan Kecerdasan dengan Menghargai Fitrah Setiap Anak*. Bandung: Kaifa
- Dantes, Nyoman. 2008. *Sistem Kredit Semester (SKS) Dan Pembimbing Akademik (PA) Dalam Kaitan Dengan Implementasi Rintisan Sekolah Katagori Mandiri (SKM) dalam In House Training (IHT) Rintisan SKM-SMA Dwijendra Denpasar*. Diunduh di <http://pasca.undiksha.ac.id/> pada Senin 04 April 2016.
- Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas. 2015. *Model Pengembangan Sistem Kredit Semester*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas.
- Fattah, Nanang. 2009. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Graves, K. 2001. "A Framework of Course Development Processes". In David R. Hall & Ann Hewings (Eds). *Innovation in English Language Teaching: A Reader*. London: Routledge Taylor & Francis Group, 178-96.
- Hamalik, Oemar. 2001. *Pendekatan Baru Strategi Belajar Mengajar Berdasarkan CBSA*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- _____. 2008. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara
- _____. 2010. *Kurikulum Manajemen Pengembangan Kurikulum*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- _____. 2011. *Dasar-dasar Pengembangan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset
- Harjanto. 1997. *Perencanaan Pengajaran*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hasan, S. Hamid. 2009. *Evauasi Kurikulum*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Hawadi, Reni Akbar. 2004. *Akselerasi (A-Z informasi program percepatan belajar dan anak berbakat intelektual)*. Jakarta: PT Gramedia Widiarsana Indo.
- Idi, Abdullah. 2013. *Pengembangan Kurikulum Teori & Praktek*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Jamil, M. Sobrun. 2012. Konsep dan Implementasi SKS (Sistem Kredit Semester) Dalam Pembelajaran di PP As Salafiyah, Mlangi, Nogotirto, Gamping, Sleman. *Skripsi*. Jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Yogyakarta. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2016.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2012. *Bahan Uji Publik Kurikulum 2013*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Manullang, M. 2006. *Dasar-dasar Manajemen*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif. (Edisi Revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. 2013. *Pengembangan dan Implementasi kurikulum 2013*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, S. 2004. *Metode Research*. Jakarta: Bumi Aksara.
- _____. 2008. *Asas-Asas Kurikulum*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang *Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah*.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2014 tentang *Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah*.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158 Tahun 2014 tentang *SKS*.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang *Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah*.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2006 tentang *Standar Isi*;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*, Pasal 11;
- Richey, Rita C., Klein James D. & Tracy, Monica W. 2011. *The Instructional Design Knowledge Base: Theory, Research, and Practice*. New York: Routledge.
- Rusman. 2009. *Manajemen Kurikulum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Santoso, Arfie B. 2015. Pendidikan Berbasis SKS (Sistem Kredit Semester) Dalam meningkatkan Prestasi Akademik Siswa Kelas SCI (Studi Kasus di SMA Takhassus Al-Qur'an Kalibeyer Wonosobo). *Tesis*. Program Studi Pendidikan Islam, Konsentrasi Pendidikan Agama Islam. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Diunduh di <http://digilib.uin-suka.ac.id/>. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2016.
- Saputra, Adi. 2014. *Sistem Kredit Semester*, diunduh <http://smantibatam.sch.id/wp-content/uploads/2014/08/SISTEM-KREDIT-SEMESTER.pdf> pada Senin 28 Maret 2016.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadinata, Nana S. 2012. *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Tayibnapis, Farida Yusuf. 2008. *Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi Untuk Program Pendidikan dan Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.

- TIM Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. 2014. *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 12;
- Wahyudin, D. 2014. *Manajemen Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Wibowo, Fandi. 2015. Kesiapan Sekolah dalam Melaksanakan Kurikulum 2013 Di SMA Negeri 4 Kota Tegal. *Skripsi*. Program Studi Teknologi Pendidikan. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Semarang. Diunduh di <http://lib.unnes.ac.id/>. Diakses pada tanggal 29 April 2016.
- Zaqiyatun, Anis N & Suharningsih. 2012. Pengaruh Penerapan Sistem Kredit Semester (SKS) Terhadap Manajemen Diri Siswa Di SMP 1 Sidati Sidoarjo. *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Volume 03 Nomor 04 Tahun 2012. Diunduh pada 20 Oktober 2016 di <http://ejournal.unesa.ac.id>. Diakses pada tanggal 30 Agustus 2016.
- Zuraida, Januar R., dan Totok Suryanto. 2016. Hubungan Kemandirian Belajar Siswa Kelas X Program Sistem Kredit Semester (SKS) Dengan Prestasi Belajar PPKn Di MAN Bangkalan Tahun Pelajaran 2015/2016. *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, Volume 02 Nomor 04 Tahun 2016. Diakses melalui <http://ejournal.unesa.ac.id>. pada tanggal 30 Agustus 2016.